

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Oleh :

BAHJATUN NADZILAH YAHSIA

5553190072

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Oleh :

BAHJATUN NADZILAH YAHSIA

5553190072

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

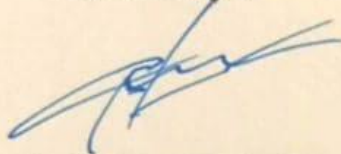
Skripsi dengan judul:

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI BANTEN**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Kamis, 1 Februari 2024 oleh Dewan Penguji.

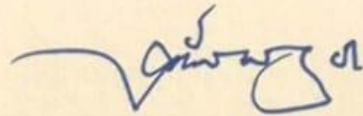
Serang, 2 Februari 2024

Pembimbing I



Sayifullah, S.E., M.Akt
NIP. 198204222008121003

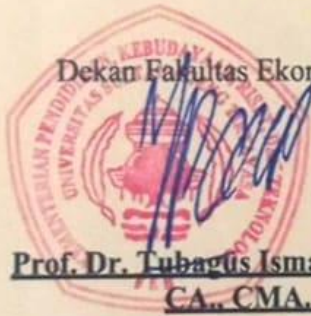
Pembimbing II



Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T
NIP. 198801052024211019

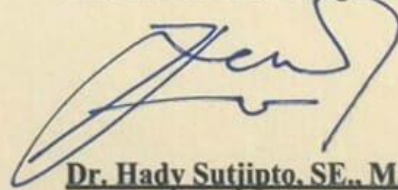
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE.Ak., M.M.,
CA., CMA., CPA
NIP. 197312302001121001


Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan




Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

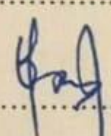
Sayifullah, S.E., M.Akt
NIP. 198204222008121003

Tanggal 9/2/24 Tanda Tangan 

Umayatu Suiroh Suharto., S.E., M.Si
NIP. 197309242006042010

Tanggal 31/2/24 Tanda Tangan 

Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E
NIP. 199106272019032023

Tanggal 8/06/24 Tanda Tangan 

Nama : Bahjatun Nadzilah Yahsa
NIM : 5553190072
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

LEMBAR PERNYATAAN

Bahjatun Nadzilah Yahsa, 5553190072, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul :

“Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten”

Saya tulis sebagai sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 2 Februari 2024



Bahjatun Nadzilah Yahsa

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah, 2:286)

*“Semua ada waktunya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain.
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat
waktunya tiba” - B.J. Habibie*

Persembahan

*Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha
semaksimal mungkin dan tidak menyerah dengan keadaan. Serta saya
persembahkan untuk kedua orang tua & kakak-kakak saya yang sudah memberi
dukungan secara moril dan materil serta mendoakan dengan tulusnya tanpa
henti.*

ABSTRACT

In this era of fiscal decentralization, there is increasing demand from the public for public services in their regions to be further improved. To procure assets for a region, the Regional Government carries out capital expenditure as an investment to finance the implementation of regional autonomy which aims to improve the welfare of development infrastructure and facilities and infrastructure of a region. This research aims to analyze the influence of Balancing Funds Locally-Generated Revenue on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Banten Province. The Balancing Fund variables taken are DAU, DAK, and DBH. The data used in this research is secondary data obtained from publications by the Central Statistics Agency for the period 2017 to 2021. The analytical method used in this research is the Panel Data approach with the OLS (Ordinary Least Square). The results of this research prove that there is a significant influence on the DBH and PAD variables on capital expenditure, but the DAU and DAK variables have no effect on capital expenditure in Banten Province from 2017 to 2022.

Keywords : Capital Expenditure, Balancing Fund, Data Panel, Locally-Generated Revenue (PAD)

ABSTRAK

Masa era desentralisasi fiskal ini, semakin banyak permintaan masyarakat akan pelayanan publik di daerahnya untuk lebih ditingkatkan lagi. Untuk pengadaan aset suatu daerah, Pemerintah Daerah melakukan belanja modal sebagai investasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur pembangunan serta sarana dan prasarana suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Variabel Dana Perimbangan yang diambil yaitu DAU, DAK, dan DBH. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Data Panel dengan model OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh signifikan pada variabel DBH dan PAD terhadap Belanja Modal, namun variabel DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten tahun 2017 sampai 2022.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Panel Data, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasih dan maha Penyanyang. Puji dan syukur Alhamdulillah dengan kehadiratnya, yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dibuatnya skripsi ini untuk menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten” penulis berharap dapat memberikan sedikit pengetahuan untuk semua masyarakat dan juga peneliti sendiri.

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan baik dari segi penulisan ataupun yang lainnya. Penulis berharap saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyusunan penelitian ini. Penulisan dan penyusunan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan penelitian ini. Dan tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE.Ak., MM., CA., CMA., CPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Saharuddin Didu, S. TP., M.E, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Tony S. Chendrawan, S.T., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dari awal perkuliahan semester sampai sekarang.
6. Bapak Sayifullah, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing pertama yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rah Adi F Ginanjar, S.E., M.T., selaku Dosen Pembimbing kedua yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tua, kakak-kakak, dan keluarga terdekat saya yang telah memberikan dukungan beserta doa tulusnya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman masa perkuliahan, Rifa, Nyimas, Suci, Wulan, Rina, Asti, Jean dan teman-teman kelas C yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih sudah memberi semangat dan doa serta tukar pikiran selama proses perkuliahan dan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Ekonomi Publik, Dika, Sindi, Fariz, Bagas yang telah menemani dan membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Orang-orang terdekat di luar perkuliahan, Intan, Putri, Ka Depi, Ka Okta, Ka Tuti, Teh Dhea, Teh Wawah, Rena, dan Aryo yang sudah selalu menemani dan memberikan dukungan beserta doa tulusnya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Dan yang paling utama, diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun tidak sempurna namun berhasil melewatkannya dengan berbagai cobaan internal maupun eksternal.

Serang, Januari 2024

Bahjatun Nadzilah Yahsa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	12
1. 3 Tujuan Penelitian	13
1. 4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2. 1 Kajian Teoritis	15
2. 2 Kajian Empiris	33
2. 3 Kerangka Pemikiran	37
2. 4 Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat	40
2.4.1. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	40
2.4.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	41
2.4.3. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	42
2.4.4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	42
2. 5 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3. 1 Ruang Lingkup Penelitian	45
3. 2 Jenis dan Sumber Data	45
3. 3 Metode Pengumpulan Data	46

3.4	Operasionalisasi Variabel.....	46
3.5	Model Penelitian dan Teknis Analisis.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum	62
4.1.1.	Perkembangan Belanja Modal	62
4.1.2.	Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	64
4.1.3.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus.....	66
4.1.4.	Perkembangan Dana Bagi Hasil.....	67
4.1.5.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	68
4.2	Hasil Analisis dan Estimasi Model Regresi Data Panel.....	69
4.2.1.	Analisis Deskriptif	69
4.2.2.	Hasil Pengujian Pemilihan Model	70
4.2.3.	Hasil Estimasi Model.....	72
4.2.4.	Hasil Uji Asumsi Klasik	74
4.3	Hasil Uji Hipotesis Statistik	80
4.3.1	Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	80
4.3.2	Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	82
4.3.3	Determinasi (R-Squared)	82
4.4	Pembahasan.....	83
4.4.1.	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	83
4.4.2.	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	86
4.4.3.	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	88
4.4.4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	90
4.4.5.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		93
5.1	Simpulan	93
5.2	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah).....	8
Tabel 2.1 Kajian Empiris	33
Tabel 3.1 Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	71
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	72
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Panel Data	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Diferensiasi.....	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Provinsi Banten dan beberapa daerah di Jawa Barat tahun 2022 (Milyar Rupiah)	4
Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)	9
Gambar 1. 3 Persentase Realisasi Belanja Modal di Provinsi Banten	10
Gambar 1. 4 Grafik Perbandingan Belanja Daerah Provinsi Banten	11
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4. 1 Perkembangan belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	63
Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	65
Gambar 4. 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	66
Gambar 4. 4 Perkembangan Dana Bagi Hasil pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	67
Gambar 4. 5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	68
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintah Daerah memberikan otoritas sepenuhnya kepada setiap daerahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus kewenangan daerahnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan serta dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.

Pada masa era desentralisasi fiskal ini, semakin banyak permintaan masyarakat akan pelayanan publik di daerahnya untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama pada sektor publik. Sebagaimana yang tercantum dalam anggaran daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan belanja daerah tersebut untuk peningkatan fasilitas publik dan sumber daya daerahnya. Selain untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan suatu daerah, dapat juga meningkatkan daya tarik dan minat bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah yang nantinya akan memajukan pembangunan suatu daerah. (Dace Purba et al., 2021)

Untuk pengadaan aset suatu daerah, Pemerintah Daerah melakukan belanja modal sebagai investasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur pembangunan serta sarana dan prasarana suatu daerah. Alokasi belanja modal tidak hanya untuk menambah fasilitas publik, juga dilakukan demi kelancaran aktivitas dan menunjang kegiatan pemerintah daerah tersebut.

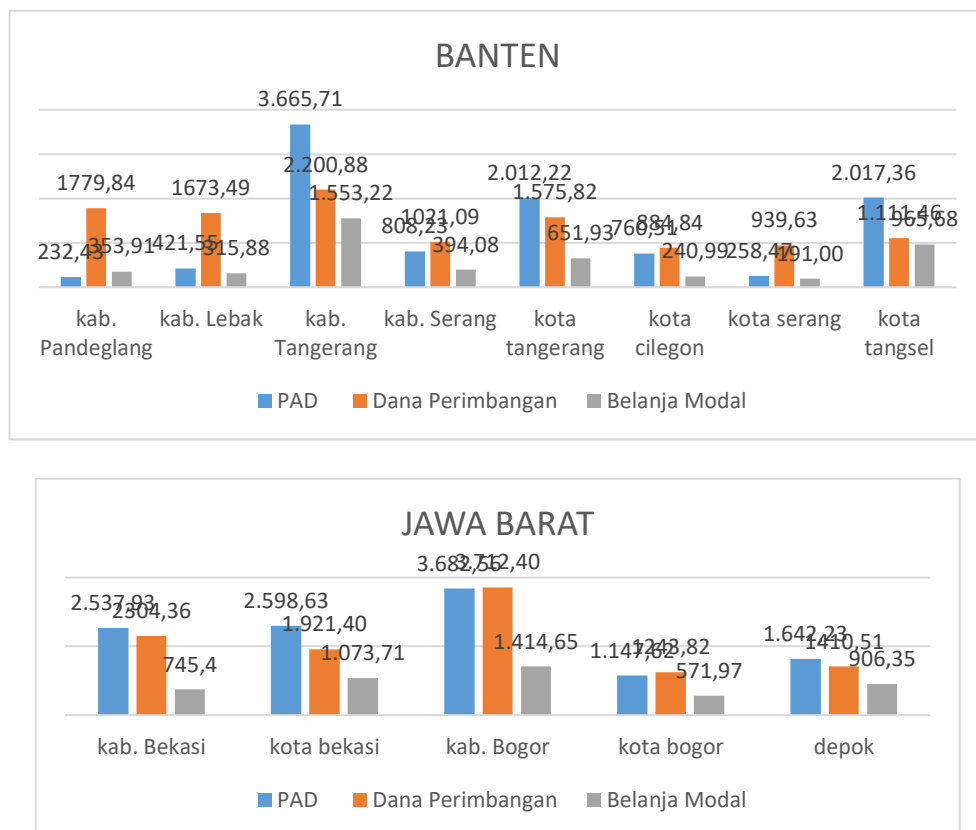
Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan suatu daerah maka dibutuhkan anggaran daerah yang semakin besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah maka diperlukannya sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sumber utama dalam penerimaan untuk pembangunan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber kemandirian daerah itu sendiri. Sementara pada subsidi atau transfer daerah dari tingkat pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dana pendukung atau tambahan saja, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah (Roma & Sinaga, 2019).

Pada setiap daerah memiliki kapabilitas keuangan yang berbeda dalam mendanai aktivitas dan kegiatannya, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah. Oleh sebab itu, dalam mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dari APBN ini untuk mendukung kebutuhan daerahnya sebagai pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut disebut dana

perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang pengalokasiannya mengutamakan aspek pemerataan wilayah dan keadilan yang selaras dengan pengelola urusan pemerintah (UU No. 32 pada tahun 2004). Dengan adanya transfer dana APBN dari pusat ini diharapkan kepada pemda untuk dapat lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk menganggarkan belanja modal di daerahnya. Dana perimbangan yang berikutnya yaitu Dana Alokasi Khusus. DAK adalah dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya untuk dana tertentu yang tujuannya membantu dengan mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan yang terakhir yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang mana dananya dialokasikan pada tiap daerah yang memperlihatkan (Roma & Sinaga, 2019).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini yaitu DAU dimana pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 pada tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan dalam membiayai belanja modal di

daerahnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU yaitu DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Dana perimbangan selain DAU dan DAK yaitu DBH. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Sumber: Portal Data DJPK (data diolah)

Gambar 1. 1 Perbandingan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Provinsi Banten dan beberapa daerah di Jawa Barat tahun 2022 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan pada gambar 1.1 yaitu merupakan perbandingan nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara letak geografis, Provinsi Banten adalah Provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan Ibu Kota NKRI. Berada di ujung bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki posisi strategis dari segi jalur perdagangan dan wilayah penduduk ibu kota. Dikomparasikan dengan beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, sebelah Selatan dengan Kabupaten dan Kota Bogor serta Depok.

Sebagai daerah yang letaknya berdekatan dengan ibu kota seharusnya menjadi keuntungan dalam meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di daerah tersebut. Banten juga menjadi penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa yang menjadikan Banten sebagai lokasi aglomerasi perekonomian. Namun jika dilihat dari kondisinya Provinsi Banten sangat tertinggal dari infrastruktur daerahnya. Bahkan terdapat artikel yang ditulis oleh Agnes Z. Yonatan pada November 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 3 Daerah di Provinsi Banten menempati posisi teratas yang menyatakan wilayah dengan harapan hidup terendah di Pulau Jawa.

Jika dilihat perbandingan gambar diatas, pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat gambaran fluktuasinya lebih seimbang dibanding Provinsi Banten. Dapat diketahui bahwa dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat sebanding dengan PAD yang didapatkan di daerahnya. Berbeda dengan Provinsi

Banten yang mana terjadi ketimpangan jika dilihat dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modalnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 memiliki visi dan misi yang dimana tercantum visi yang berbunyi “*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dengan misi diatas terdapat beberapa prioritas unggulan serta rincian program rencana pembangunan. Pada prioritas pertama yaitu meningkatkan serta membangun kualitas infrastruktur. Untuk pembangunan jalan Provinsi yang rusak akan diperbarui pembangunan 273.000 meter dari total 852.000 meter jalan provinsi. Lalu jalan Kolektor Baru yang dimana jalan tersebut untuk membuka jalur isolasi dan berfungsi sebagai interkoneksi antar wilayah. Adapula rencana pembangunan jembatan dengan memperbaiki jembatan di seluruh jalan Provinsi dan jembatan penyebrangan sebagai fasilitas pelayanan publik untuk

mempermudah akses penduduk serta menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Adapula misi untuk menormalisasikan 32 sungai dan 41 situ serta merevitalisasi Bendungan dan Irigasi yang ada di seluruh Banten untuk mengembalikan fungsinya salah satunya yaitu upaya untuk menyelesaikan persoalan banjir. Untuk rencana pembangunan dan pengembangan sistem sarana transportasi massal skala provinsi akan ada pembangunan terminal tipe B dan infrastruktur transportasi laut untuk aktivitas ekonomi sektor maritim. Pada sektor pariwisata adanya rencana untuk merevitalisasi Kawasan Banten Lama serta pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi diperlukan evaluasi untuk perencanaan pemanfaatannya serta penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, dan Perdesaan/Perkotaan. Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk pembangunan daya dukung lingkungan yang perlu dipertahankan.

Lalu ada prioritas berikutnya yaitu pada bidang Pendidikan dimana perlu untuk meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas serta membentuk siswa yang berakhlaqul karimah dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam fungsi sekolah. Untuk merealisasikan misi itu dibuatlah rencana pembangunan sebanyak 2.016 Ruang Kelas Baru atau 168 Unit Sekolah untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK dari 66 ke 80 yang biayanya setara dengan 705 Miliar. Pada tenaga pendidik pun diperlukan peningkatan kompetensi guru yang berpendidikan Strata 1 bagi 343 Guru SMA dan 820 Guru SMK, Strata 2 bagi 500 Guru SMA dan SMK. Namun, dengan seiring peningkatan

kompetensi guru, diperlukan pula meningkatkan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK.

Pada prioritas unggulan berikutnya yaitu dibidang Kesehatan dinyatakan bahwa diperlukan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan kapasitas regulasi dibidang pelayanan kesehatan. Maka diadakan usulan mengembangkan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional. Lalu penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440 Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat. Serta Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan 8 Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

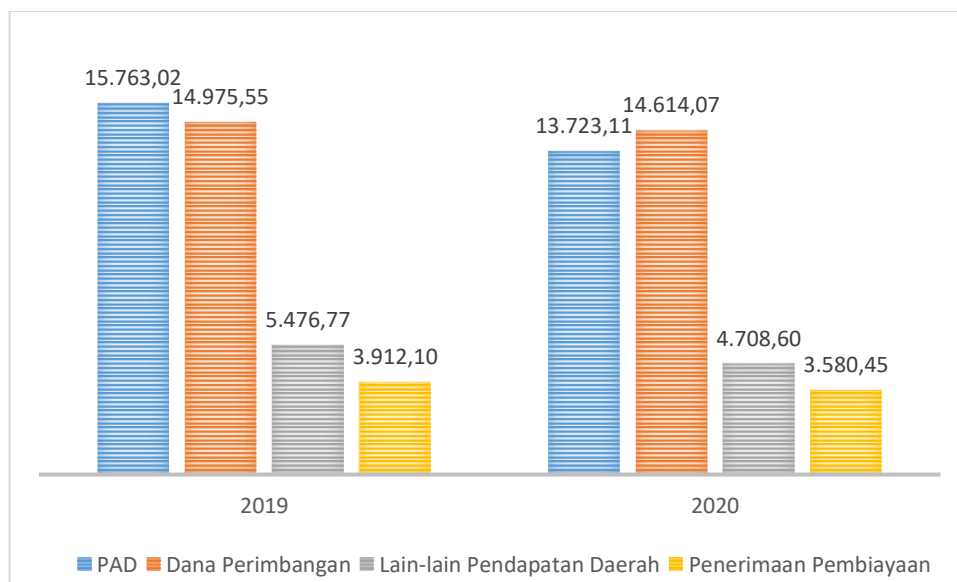
Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 (Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pandeglang	541.39	343.01	361.84	224.20	333.55	353.91
2	Kab. Lebak	374.00	313.77	384.61	228.26	281.85	315.87
3	Kab. Tangerang	1,530.66	1,763.56	1,392.37	976.51	1,245.79	1,553.22
4	Kab. Serang	463.75	589.72	600.92	371.99	401.56	394.08
5	Kota Tangerang	1,013.68	1,024.75	880.36	278.62	555.02	651.93
6	Kota Cilegon	500.71	304.64	413.22	201.31	202.11	240.99
7	Kota Serang	333.51	431.08	252.84	178.52	245.66	191.00
8	Kota Tangsel	1,007.51	1,019.93	1,206.42	732.90	748.79	965.68

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten

Dari tahun 2017 hingga tahun 2022, realisasi belanja modal cenderung semakin menurun di setiap daerahnya. Padahal Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD dan Dana Perimbangan-nya. Salah satu potensi PAD Provinsi Banten adalah dari sumber daya alam yang melimpah seperti sektor pariwisata yang berada di Kabupaten

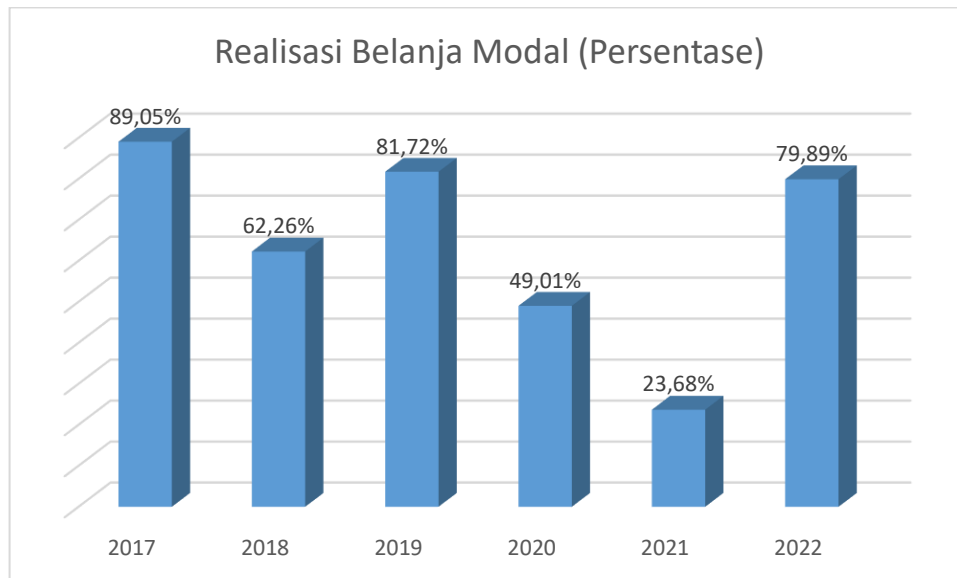
Pandeglang, Kabupaten Serang (anyer), Kabupaten Lebak, lalu sektor perikanan karena 75% Banten dikelilingi oleh laut, lalu sektor pertanian pada setiap kota dan kabupatennya, serta sektor industry di Cilegon yang dikenal sebagai kota penghasil baja terbesar di Asia Tenggara merupakan keunggulan kompetitif. Selain itu, letak dan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan ibukota negara yaitu DKI Jakarta.



Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2020

Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)

Dalam rancangan RKPD 2019 dengan tema prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten pada acara Musrenbang RKPD tahun 2019 di Kabupaten Lebak, disebutkan tujuan RKP Nasional yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Hal tersebut menjadi acuan rencana kerja pemerintah Provinsi banten yaitu dapat menguranginya kesenjangan wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastuktur daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.



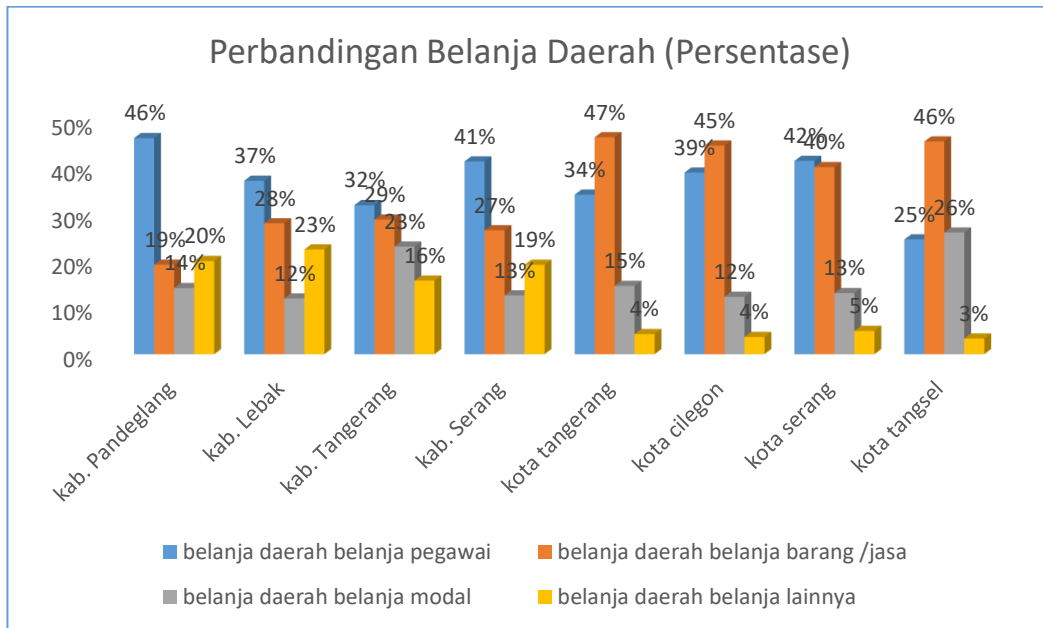
Sumber : DJPK Portal Data APBD

Gambar 1. 3 Persentase Realisasi Belanja Modal di Provinsi Banten

Dapat dilihat pada gambar 1.2 menunjukkan persentase realisasi belanja modal di Provinsi Banten. Dapat diketahui persentase pemanfaatan belanja modal secara realisasi dengan belanja modal yang dianggarkan. Semakin besar persentase maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja modal dengan baik. Berdasarkan data diatas bahwa realisasi belanja modal Provinsi Banten, masih belum maksimal memanfaatkan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Terutama yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang persentase realisasinya tidak mencapai 50% dari anggarannya. Hal tersebut salah satu dampak dari pandemic Covid 19 yang membuat pembangunan daerah kurang produktif.

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor

pendidikan, kesehatan, jalan, dan transportasi yang layak sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.



Sumber : DJPK 2022 (data diolah)

Gambar 1. 4 Grafik Perbandingan Belanja Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan data pada gambar 1.3, dapat dilihat bahwa belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2022 lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dibandingkan belanja modal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga diperlukan anggaran belanja modal yang cukup besar untuk mencapai keberhasilan pembangunan Provinsi Banten. Potensi dana penerimaan daerahnya pun Banten pun cukup menjanjikan jika dilihat dari sektor unggulannya pada setiap kota dan kabupatennya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.” Dengan melihat pengaruh peningkatan pada DAU, DAK, DBH, dan PAD sebagai pendapatan daerah yang diketahui mampu meningkatkan alokasi maupun realisasi terhadap belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
5. Bagaimana pengaruh DAU, DAK, DBH & PAD secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
5. Untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, DBH & PAD secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini sebagai alternatif masukan atau saran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien dalam pemanfaatannya agar tercapainya keberhasilan yang ingin tercapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi menambah pengetahuan serta acuan dalam penelitian selanjutnya untuk dibidang yang sama seperti penelitian ini.

3. Manfaat bagi saya sebagai peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan dari penelitian ini dapat mengetahui pengaruh dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal serta penerapan teorinya untuk menganalisis kinerja Perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

Penelitian dalam bab ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang sebelumnya telah diteliti lebih lanjut oleh peneliti lain. Maksud dari penelitian sebelumnya yaitu untuk memberikan referensi pembelajaran bagi penulis untuk melakukan penelitian ilmiah secara keseluruhan dengan meninjau informasi pada indikator variabel bebas (Belanja Modal) dan variabel terikat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah).

Teori *Stewardship*

Perkembangan teori *stewardship* ini untuk menerapkan bahwa akuntansi organisasi sektor publik telah disiapkan untuk melengkapi kebutuhan informasi keuangan. Informasi keuangan sektor publik dapat dilihat dari kemampuan keuangan pemerintahan melalui pendanaan pemerintah daerah. Pendanaannya yang dapat dilakukan ditinjau dari keadaan Tingkat otonomi keuangan daerah yang mana merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatnya pengelolaan daerah. (Rahma & Riharjo, 2019)

Sebagaimana kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja keuangan daerah yang mana merealisasikannya melalui eksplorasi kekayaan alam daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah untuk lebih ditingkatkan lagi pertumbuhannya oleh pemerintah daerah setempat. (Rahma & Riharjo, 2019)

Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* ini merupakan kelompok atau individu yang memengaruhi kepentingan yang dapat mempengaruhi proses pencapaian suatu tujuan yang akan diraih dalam sekelompok organisasi atau entitas (Eksandy et al., 2019). Dalam konteks pemerintahan, yaitu pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *Stakeholder*.

Pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk mensejahterakan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.1. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi yang dihitung dari indikator hasil pengurangan pendapatan dengan pengeluaran untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk Pembangunan daerah dalam periode melebihi satu tempo akuntansi. (Herawati & Lestari, 2022). Belanja modal dapat dideskripsikan sejenis asset tetap yang dimiliki suatu daerah, karena keberlanjutannya bukan hanya sekedar untuk jangka pendek, sehingga diharapkan mampu berguna dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemda untuk menunjang akomodasi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Dari penjelasan definisi belanja modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan aspek dari asset daerah yang anggarannya dibelanjakan untuk

meningkatkan pelayanan dan kinerja pemda dalam membangun kesejahteraan daerahnya. (Herawati & Lestari, 2022)

Dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 yang dimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (BPK, 2006) belanja modal adalah suatu anggaran APBD yang pengeluarannya digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap yang memiliki wujud dan nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang bermanfaat dapat digunakan untuk keperluan kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan asset lainnya. Dalam pembangunan aset tetap berwujud itu tidak termasuk anggaran untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian setiap asset karena anggaran tersebut sudah dianggarkan pada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Namun, peraturan tersebut di revisi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Atas et al., 2007) bahwa anggaran belanja modal mencakup pengeluaran harga pembelian asset yang ditambah seluruh belanja yang berkaitan dengan proses pengadaan pembangunan asset sampai selesai hingga siap digunakan.

Teori Adolf Wagner

Menurut Soepangat dan Mursinto dalam Badrudin (Badrudin, 2019, p. 62), pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat karena semakin banyaknya kegiatan pemerintah yang membutuhkan pembiayaan. The Law of Ever Increasing State Activities adalah hukum dimana semakin bertambahnya kegiatan negara maka semakin banyaknya kebutuhan dan pengeluaran negara. Karena

semakin banyaknya pengeluaran, peningkatan tersebut memiliki arti yang relatif yaitu perlu dibandingkan pengeluaran negara dengan Produk Nasional Bruto dan pengeluaran sector swasta.

Teori Peacock-Wiseman

Menurut Soepangat dalam Badrudin (2012:62-63), berdasarkan teori yang dijelaskan Adolf Wagner yang mana pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena kegiatan dan kebutuhan pemerintah semakin bertambah, Peacock-Wiseman menjelaskan pula tiga kelemahan dari teori tersebut, yaitu:

- 1) Berdasarkan teori kenegaraan yang sudah tidak dianut oleh negara-negara Barat, karena teori organistis menyatakan bahwa negara merupakan organisme tersendiri terlepas dari warga negaranya yang mempunyai kebutuhan sendiri pula, sehingga apabila warga negaranya semakin banyak kebutuhan maka kebutuhan negara juga meningkat.
- 2) Tidak memperdulikan pengaruh perang terhadap kebutuhan pengeluaran negara
- 3) Kurang memperhitungkan waktu dan proses pembangunan negara karena selalu mementingkan aspek jangka Panjang

Dalam teori Peacock-Wiseman ini terdapat perkembangan pengeluaran negara dengan bentuk *steplike* yang disebabkan oleh tiga efek yang saling mempunyai keterikatan satu sama lain, yaitu *displacement effect* yang mana merupakan efek dari fenomena kenaikan pengeluaran pemerintah yang berdampak besar pada negara akibat peristiwa seperti peperangan yang mengejutkan

masyarakat namun dampak peningkatan pengeluaran tidak begitu dirasakan karena adanya rasa toleransi dan empati. Kedua ada *Inspection effect* yang merupakan efek inspeksi dari pemerintah dan masyarakat yang disebabkan oleh adanya fenomena guncangan seperti perang dan depresi maka diperlukan pengawasan pengeluaran pemerintah yang sebelumnya tidak diketahui. Terakhir ada *Concentration effect* yang merupakan efek dari kewenangan yang sebelumnya dilakukan oleh pemda atau sector swasta, berubah konsentrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Belanja modal terdiri dari 5 (lima) komponen (Roma & Sinaga, 2019) yaitu:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan, penyelesaian, balik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pemataan tanah, pembuatan sertifikat, dan biaya pengeluaran lainnya selama masa perolehan hak atas tanah sampai kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang nilainya bermanfaat selama periode lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam Pembangunan Gedung dan bangunan untuk menambah kapasitas sampai kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan, pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan jalan irigasi dan jaringan untuk menambah kapasitas sampai kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya, yaitu biaya yang digunakan untuk pengadaan Pembangunan atau pembuatan dan perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, dinyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang meliputi belanja modal untuk perolehan dan pengadaan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud lainnya yang dapat di ukur dengan perhitungan (Purba et al., 2021) sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = BT + BPM + BGB + BJIJ}$$

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana untuk pemerintah daerah yang diberikan dari pemerintah pusat yang didapatkan dari pendapatan negara yang harus diberikan sebagian kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar masing-masing daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan daerah yang memiliki pendapatan lebih rendah. Dana perimbangan ini biasanya diberikan kepada daerah yang pendapatannya rendah dan memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

Dana perimbangan ini bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Dana perimbangan ini bersumber dari pajak yang terutang oleh pemerintah pusat dan dipungut oleh pemerintah daerah serta sumber-sumber lain yang ditentukan

oleh undang-undang. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat diterapkan dalam konteks dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah pusat legislatif (DPRD) berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) sebagai agen yang ditugaskan untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh prinsipal (Sudika & Budiarta, 2017).

Dalam perspektif sektor publik, prinsipal (pemerintah pusat) memberikan dana kepada agen (pemerintah daerah) untuk melaksanakan program dan kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan. Program yang akan dijalankan disusun anggaran daerahnya oleh pemda dalam bentuk RAPBD yang kemudian diserahkan kepada DPRD. Jika RAPBD yang diajukan telah dianggap sesuai dengan RKPD, maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. (Sudika & Budiarta, 2017)

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan dana perimbangan yang diberikan. Beberapa mekanisme yang dapat dilakukan antara lain adalah pengawasan dan audit, evaluasi kinerja, serta pemberian insentif atau sanksi sesuai dengan kinerja agen.

Dalam teori keagenan, prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya harus bekerja sama dan saling menguntungkan agar tujuan

bersama dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan bahwa dana perimbangan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal adalah suatu teori yang menjelaskan tentang alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori ini memberikan landasan dalam pengaturan dan pengelolaan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam federalisme fiskal, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai bentuk subsidi dan bantuan keuangan, terutama untuk daerah-daerah yang kurang berkembang atau memiliki keterbatasan keuangan.

Dalam federalisme fiskal, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam alokasi dana perimbangan, yaitu:

- 1) Prinsip Desentralisasi Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemerintah pusat harus memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Prinsip Pemerataan Pemerintah pusat harus memastikan bahwa ada kesetaraan dalam alokasi dana perimbangan antara daerah yang satu dengan

yang lainnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dengan yang kurang maju.

- 3) Prinsip Keberlanjutan Alokasi dana perimbangan harus dapat mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan di daerah. Dana perimbangan harus digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah.
- 4) Prinsip Akuntabilitas Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana perimbangan yang diterimanya. Pemerintah pusat harus memberikan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah.

Teori Federalisme Fiskal dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa alokasi dana perimbangan dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan pemasukan yang diperoleh dari APBN untuk pembiayaan operasional pemda setempat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pemerintah daerah tersebut. (Raviyanti et al., 2017). DAU dikategorikan berdasarkan sumber utama untuk operasional pemerintah daerah Tingkat dua dengan besaran 80% dan bagian terbesar untuk proporsinya dalam dana

perimbangan. DAU bertujuan untuk pemerataan Pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan kebutuhannya, maka dari itu besaran pengalokasiannya dapat berbeda-beda tiap daerah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa DAU adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah daerah yang dianggarkan APBN dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui Pembangunan yang merata, serta potensi yang perlu direalisasikan. (Herawati & Lestari, 2022)

Besaran DAU yang diterima pemda setempat dapat berperan dalam besaran Belanja Modal juga. Hal ini dijelaskan berdasarkan definisi DAU yang merupakan pemasukan daerah dari salah satu Dana Perimbangan yang nilainya cukup tinggi yang menyebabkan muncul kebijakan pembelanjaan dana daerah kebanyakan bersumber dari DAU. Oleh karena itu, belanja modal cenderung meningkat disebabkan semakin besar kebutuhan daerah yang didanai. (Herawati & Lestari, 2022)

Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*) dalam konteks Dana Alokasi Umum (DAU) mengacu pada pandangan bahwa DAU diberikan untuk mendorong terciptanya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah pusat memberikan DAU untuk program atau proyek yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut teori ini, DAU harus didasarkan pada kebutuhan dan prioritas yang ditentukan secara nasional, regional, dan lokal. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebutuhan dan

prioritas daerah dalam menetapkan alokasi DAU, sehingga DAU dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di daerah.

Dalam teori kebijakan publik, DAU juga dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. DAU dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Dalam hal ini, pemerintah daerah dianggap sebagai mitra yang aktif dalam pembangunan nasional, dan DAU digunakan untuk mendorong kerjasama dan partisipasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam teori kebijakan publik, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa DAU digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah pusat harus memantau penggunaan DAU dan memastikan bahwa program dan proyek yang didanai oleh DAU tercapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum (Dace Purba et al., 2021) terdiri dari:

- a. Kecukupan (*Adequacy*)
- b. Netral dan efisien (*Neutrality and Efficiency*)
- c. Akuntabilitas (*Accountability*)
- d. Relevansi (*Relevancy*)
- e. Keadilan (*Equity*)
- f. Objektivitas dan transparansi (*Objectivity and transparency*)
- g. Kesederhanaan (*Simplycity*)

2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dapat didefinisikan sebagai pemasukan daerah dengan APBN guna pembiayaan kegiatan yang bersifat khusus sebagai salah satu upaya untuk mencapai target pembangunan nasional pada daerah setempat dengan besaran DAK menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dengan prioritas yang akan dipenuhi, sehingga antara daerah satu dengan lainnya memiliki besaran yang berbeda (Jumiati et al., 2019). Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa DAK merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber APBN untuk mencapai target nasional dengan besaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah setempat.

Besaran DAK yang diterima oleh pemerintah daerah setempat juga berperan dalam besaran Belanja Modal. Hal ini dapat dijelaskan menurut fungsi dan peruntukan DAK untuk peningkatan cakupan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi atau beragam prioritas yang ada maka pengalokasian Belanja Modal akan mengalami peningkatan. (Jumiati et al., 2019)

Perimbangan Keuangan arah kegiatan pemerintahan untuk DAK adalah sebagai berikut:

1. DAK Pendidikan
2. DAK Kesehatan
3. DAK Keluarga Berencana
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

5. DAK Infrastruktur Irigasi
6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
7. DAK Pertanian
8. DAK Kelautan dan Perikanan
9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah
10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan
11. DAK Kebutuhan
12. DAK Perdagangan

Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) menyatakan bahwa DAK harus didistribusikan secara adil dan merata kepada semua daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar-daerah. Tujuan dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dalam konteks DAK, pemerintah pusat harus memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah dalam menentukan besarnya dana yang akan dialokasikan. DAK harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kebutuhan mendesak dan memperoleh penghasilan yang rendah, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar-daerah.

Selain itu, pemerintah pusat harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi DAK. Proses alokasi dan penggunaan DAK harus

dilakukan dengan jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaannya dan menilai apakah dana tersebut digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan distributif dalam DAK dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.1.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dananya dibagi-hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. Dana bagi hasil merujuk pada pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak yang menjadi sumber dana bagi hasil adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dana bagi hasil dari pajak ini dihitung dan dibagi setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan dana perimbangan, dana bagi hasil ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun penggunaan dana perimbangan harus ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai agen dan prinsipal. Dalam konteks dana bagi hasil, teori keagenan dapat dihubungkan dengan hubungan antara investor atau pemberi dana dengan penerima dana, seperti pemerintah daerah atau perusahaan. Dalam hubungan keagenan, pemberi dana atau prinsipal mempercayakan pengelolaan dana kepada penerima dana atau agen. Agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan prinsipal memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari investasi atau proyek yang dibiayai.

Dalam hal ini, dana bagi hasil dapat dianggap sebagai insentif bagi agen untuk mengelola dana secara efektif dan efisien demi memperoleh keuntungan yang optimal bagi kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dalam dana bagi hasil dapat menjadi sumber insentif bagi agen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan prinsipal, seperti mengelola dana dengan risiko yang lebih rendah atau meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana.

Namun, teori keagenan juga mengakui adanya konflik kepentingan antara pemberi dana dan penerima dana. Misalnya, penerima dana dapat mencoba memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengambil risiko yang lebih besar, sedangkan pemberi dana berkepentingan untuk meminimalkan risiko investasi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian

untuk memastikan bahwa agen tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh prinsipal.

Teori Keadilan

Teori ini menganggap bahwa pembagian keuntungan harus didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dalam investasi atau proyek yang dibiayai. Dalam konteks dana bagi hasil, teori keadilan menuntut bahwa pembagian keuntungan harus adil dan setara antara pemberi dana dan penerima dana. Ini berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dengan kontribusinya dalam investasi atau proyek yang dibiayai.

Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah sebagai penerima dana dan investor swasta sebagai pemberi dana dapat sepakat untuk membagi keuntungan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam proyek tersebut. Pemberi dana mungkin memperoleh bagian yang lebih besar karena menanggung risiko yang lebih besar, namun penerima dana juga harus memperoleh bagian yang setara dengan upaya dan kontribusinya dalam pengelolaan proyek.

Teori keadilan juga menuntut transparansi dalam pembagian keuntungan. Pemberi dana harus memberikan informasi yang cukup tentang kinerja investasi atau proyek, sehingga penerima dana dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kontribusinya dalam proyek tersebut. Dalam hal ini, dana bagi hasil menjadi alat yang digunakan untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip keadilan dan setara antara kedua belah pihak. Pembagian keuntungan

yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam investasi atau proyek tersebut.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diartikan sebagai bagian dari pemasukan daerah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pemasukan menurut pungutan pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan yang telah dikelola sebagai PAD (Rahajeng et al., 2021). PAD dapat diidentifikasi berdasarkan semua sumber yang diterima oleh daerah dan diatur dalam peraturan daerah (perda) setempat, baik yang dikeluarkan oleh walikota atau bupati yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah setempat dan optimalisasi sumber daya. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa PAD salah satu pemasukan yang didapat oleh hasil perolehan asli pemerintah setempat yang disahkan melalui perda.

Besaran PAD yang diterima oleh pemerintah daerah setempat diketahui dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah. Tingginya upaya dalam optimalisasi sumber daya dan pelayanan masyarakat inilah membutuhkan Belanja Modal yang sejalan. Hal ini dapat dijelaskan karena PAD sebagai sumber pembiayaan dengan pembelanjaan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga Belanja Modal pun dapat turut meningkat.

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh

serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dalam konteks pengelolaan PAD, teori pengelolaan keuangan daerah ini mencakup beberapa aspek penting seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang aspek-aspek tersebut:

- 1) Perencanaan: Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan yang matang dalam pengelolaan PAD, yang mencakup penetapan target pendapatan, pemilihan sumber pendapatan yang tepat, dan perencanaan penggunaan PAD untuk pembangunan dan program-program prioritas lainnya.
- 2) Penganggaran: Pemerintah daerah harus menyusun anggaran yang realistis dan akurat, serta memperhatikan ketersediaan PAD. Dalam penganggaran, pemerintah daerah harus memprioritaskan pengeluaran untuk program-program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
- 3) Pelaksanaan: Pelaksanaan pengelolaan PAD harus dilakukan dengan efektif dan efisien, termasuk dalam proses pemungutan dan penyaluran PAD. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan PAD.
- 4) Pengawasan: Pengawasan pengelolaan PAD harus dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh instansi pengawasan lainnya.
- 5) Evaluasi: Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan PAD secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas

pengelolaan PAD serta mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai target pendapatan.

Dalam penerapan teori pengelolaan keuangan daerah pada PAD, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek-aspek tersebut secara holistik dan berkesinambungan untuk mencapai pengelolaan PAD yang efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Kajian Empiris

Studi empiris adalah sebuah studi atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain dan memiliki variabel penelitian yang sama. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu sehingga bisa digunakan untuk rujukan yang relevan oleh penulis, antara lain:

Tabel 2.1 Kajian Empiris

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
1.	Ronald C Fisher, Robert W Wassmer (2015)	<i>An Analysis of State-Local Government Capital Expenditure During the 2000s</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pendapatan X2= Pertumbuhan Penduduk X3= Dana Hibah X4= Depresiasi Infrastruktur Public	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan
2.	Elni (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal	X1 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
		Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)		<u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAK	X2 = + / Signifikan
3.	Mahameru Rosy Rochmatullah, Rudy Hartanto (2016)	<i>Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= Ketergantungan Fiskal X5= Luas Wilayah	X1 = + / Signifikan X2 = tidak berpengaruh signifikan X3 = + / Signifikan X4 = - / Signifikan X5 = + / Signifikan
4.	Heni Mulyani (2016)	<i>The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan
5.	I Komang Sudika, I Ketut Budiarta (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pajak Daerah X2= DAU X3= DAK X4= Retribusi Daerah	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = Tidak Signifikan
6.	Ni Nyoman Warasati, Anhulaila M. Palampangan dan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Studi Pada	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
	Mohammad Iqbal B (2018)	Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah			
7.	Lambok Vera Riama Pangaribuan, Sri Hartaty, Aladin, Siska Aprianti, Rany Shinta Dewi (2018)	Determinan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= SiLPA	X1 = Tidak Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan X4 = + / Signifikan
8.	Desta Nuris Rahma, Ikhsan Budi Riharjo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= DBH	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan
9.	Siti Mundiroh (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pertumbuhan Daerah X2= PAD X3= DAU X4= DBH	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = Tidak Signifikan
10.	Eva Jumiati, Mirna Indriani, Darwanis (2019)	<i>The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth On Capital</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= Dana Perimbangan	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
		<i>Expenditure Allocation</i>		X3= Dana Otonomi Khusus X4= Pertumbuhan Ekonomi	
11.	Jouzar Farouq Ishak, Citra Sukmadilaga, dan Aam Rachmat Mulyana (2020)	Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= Dana Perimbangan X3= Lain-lain Pendapatan yang Sah	X1 = + / Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan
12.	Dace Purba, Darwin Damanik, Elidawaty Purba (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Simalungun	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan
13.	Stepani Roma Uli Sinaga (2021)	Pengaruh Faktor-Faktor Anggaran Pemerintah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= DAU X2= DAK X3= PAD	X1 = Tidak Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = + / Signifikan
14.	Jouzar Farouq Ishak, Yeni Priatna Sari, Yevi Dwitayanti, Hasbi Assidiki Mauluddi (2021)	<i>The Determinant Factors of Capital Expenditure</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DBH X3= DAU X4= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan

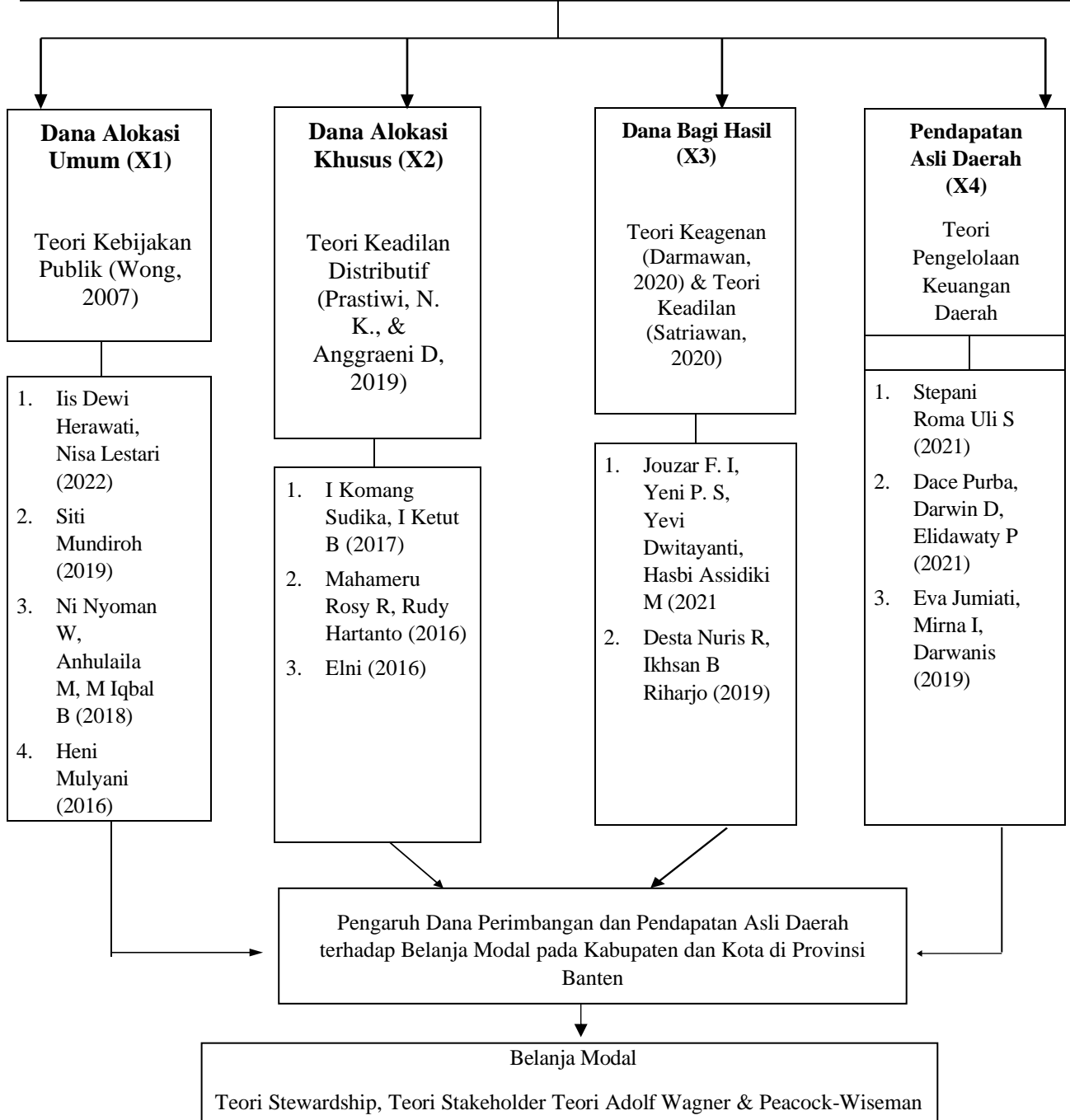
NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
15.	Iis Dewi Herawati, Nisa Lestari (2022)	Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Utara	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = - / Signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Transfer Pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Belanja Modal menjadi salah satu komponen dari belanja daerah sehingga setiap kenaikan atas Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil yang berpengaruh juga terhadap Belanja Modal suatu pemerintahan. Peningkatan pendapatan asli daerah memiliki kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan sebagai tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar kemampuan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung beban serta membiayai kewajiban belanja modal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari belanja daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sangat membantu dalam belanja pemerintah daerah terutama dalam pembangunan daerah menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah (Roma & Sinaga, 2019).

Dalam kerangka pemikiran perlu ada penjelasan dari variabel independen adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli daerah. Variabel dependennya adalah Belanja Modal. Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

- Pada era desentralisasi fiskal semakin banyak permintaan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik, maka Pemda perlu melakukan belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana
- RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 memiliki visi misi yang mengarah pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan asset daerah namun, realisasi belanja modalnya cukup jauh dari anggarannya



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat

2.4.1. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan dari daerah yang ternyata memiliki peran besar seperti PAD dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Dana perimbangan pada dasarnya adalah suatu konsekuensi yang terjadi dikarenakan adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Raviyanti et al., 2017).

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian pasti terjadi transaksi transfer yang cukup signifikan dalam anggaran pendapatan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, maka pemerintah daerah merealisasikan DAU melalui pengeluaran belanja modal.

Namun, nyatanya masih terdapat kesenjangan penggunaan DAU terhadap belanja modal di banyak daerah sehingga tidak meratanya pembangunan, sehingga DAU menjadi tidak efektif dan efisien. Kondisi seperti itu harus segera diperbaiki dan harus melakukan peningkatan pada DAU agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang layak dan baik kepada masyarakat melalui adanya Belanja Modal.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan *Theory Stakeholder* yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

2.4.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional (Patasik, 2021).

Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemerintah Daerah juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan *Theory Stakeholder* yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

2.4.3. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil berasal dari APBN yang dibagikan kepada daerah yang didasarkan pada angka presentase tertentu dengan memcermati potensi daerah sebagai pencetus. Dana bagi hasil adalah salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota (Rahma & Riharjo, 2019).

Wandira (2013) menyatakan bahwa secara sebagian terdapat pengaruh yang signifikan variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sama halnya dengan bagian dana perimbangan yang lainnya, dana alokasi khusus diharapkan dapat berpengaruh secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal terhadap APBD.

2.4.4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hubungan antara PAD dengan belanja modal merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD berasal dari iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur sarana atau prasarana tersebut dibiayai oleh alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Semakin meningkatnya belanja modal maka kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Setiap pemerintah daerah mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakatnya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang layak dan memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu caranya yaitu melalui adanya belanja modal. Apabila sarana dan prasarana yang memadai untuk Masyarakat sudah terpenuhi, maka Masyarakat dalam menjalankan segala aktifitas perekonomiannya dengan lancar yang dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan mereka untuk membayar sejumlah pungutan yang sudah ditetapkan oleh pemda seperti pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah setempat. (Anjani, 2014)

Dalam meningkatkan alokasi belanja modal, setiap daerah harus mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan potensi dari masing-masing daerah. Menurut (Darise, 2007:33) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Dengan memiliki nilai PAD yang besar, maka pemerintah daerah pun dapat meningkatkan kembali pendapatan daerahnya

dengan mengalokasikan kepada Belanja modal sebagai investasi asset di daerah tersebut.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang dirumuskan untuk diuji secara empiris. Proposisi yang menjadi ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk dalam menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
2. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
3. Terdapat Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
4. Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
5. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 secara Simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2022 secara parsial dan simultan.

Penelitian ini menggunakan model regresi untuk analisis regresi untuk keperluan estimasi. Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel dependen yaitu Belanja Modal dan 4 (empat) variabel independen (bebas) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel, yaitu analisis yang menggabungkan *data time series* dan *cross section*. Adapun *data time series* yang telah ditentukan adalah tahun 2017 - 2022, selain itu telah ditentukan juga *data cross section* yang akan diteliti terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang serta 4 (empat) kota yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder (data kuantitatif) yang terdiri dari data variabel dependen (Belanja Modal) dan variabel independen (Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan

Pendapatan Asli Daerah (X4)). Sumber data diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau informasi digunakan dalam melihat permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi literatur atau studi kepustakaan. Data dokumen merupakan tata cara pengumpulan informasi penolong dalam riset ini yang telah disusun oleh beberapa pusat data yang tersedia seperti data di badan-badan penelitian serta semacamnya.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian ini:

1. Belanja Modal (BM)

Variabel dependen ialah variabel terikat yang mendasari penelitian variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variable dependen di tulis dengan Y. Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi perilaku dari variabel terikat. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dalam analisa kinerja keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka penelitian ini menspesifikasikan bahwa variabel dependen adalah Belanja Modal dengan simbol BM dan satuan Ribu Rupiah. Belanja Modal ini merupakan komponen dari asset daerah yang dianggarkan dan dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah setempat. Data yang digunakan adalah data perhitungan APBD Provinsi Banten.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (Umar n, 2003:45). Variabel independen dapat di tulis dalam X. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisa kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menetapkan spesifikasi variabel independen yang pertama yaitu Dana Alokasi Umum dengan simbol DAU dan satuan Ribu Rupiah. Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Variabel independen yang kedua yaitu Dana Alokasi Khusus dengan simbol DAK dan satuan Ribu Rupiah. Dana Alokasi Khusus merupakan Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan dalam membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel independen yang ketiga yaitu Dana Bagi Hasil dengan simbol DBH dan satuan Ribu Rupiah. Dana Bagi Hasil merupakan Dana bagi hasil ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel independen yang keempat yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan simbol PAD dan satuan Ribu Rupiah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber ekonomi asli daerah atau penerimaan daerah dari, retribusi daerah, sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Satuan	Skala
Belanja Modal Simbol : BM	Komponen dari aset daerah yang dianggarkan dan dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun daerah setempat.	Data perhitungan APBD Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2022.	Ribu Rupiah	Rasio
Dana Alokasi Umum Simbol : DAU	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi.	Realisasi Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2022.	Ribu Rupiah	Rasio
Dana Alokasi Khusus Simbol : DAK	Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan dalam membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2022.	Ribu Rupiah	Rasio

Variabel	Konsep	Indikator	Satuan	Skala
Dana Bagi Hasil Simbol : DBH	Dana bagi hasil ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan formula yang telah ditetapkan.	Realisasi Dana Bagi Hasil di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2022.	Ribu Rupiah	Rasio
Pendapatan Asli Daerah Simbol : PAD	Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber ekonomi asli daerah atau penerimaan daerah dari, retribusi daerah, sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2017-2022.	Ribu Rupiah	Rasio

3.5 Model Penelitian dan Teknis Analisis

Analisis data merupakan suatu proses pengujian data yang prosesnya menggunakan teknik analisis tertentu yang mana hasilnya tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah bukti dalam menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan data yang telah diperoleh maka pendekatan teknik analisis yang sesuai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan teknik yang menyorot pada angka-angka dalam penelitiannya. Yang mana dari data yang diperoleh tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang tepat untuk penelitian tersebut (Roma & Sinaga, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang mana data diolah menggunakan aplikasi software EVIEWS.

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat secara parsial maupun simultan. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi data panel yang artinya gabungan antara data runtut data (*time series*) dengan data silang (*cross section*).

Menurut Roma & Sinaga (2019) dalam buku Winarno (2011) mengatakan bahwa data panel atau pooled data merupakan metode analisis yang datanya terdiri dari data *time series* dan data *cross section*. Yang mana dari data tersebut dapat dilakukan analisis regresi data panel untuk mengamati hubungan antara variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independent). Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus 8 Kabupaten/Kota dengan tahun yang akan diteliti dari 2017 sampai dengan 2022.

Ada dua tipe permodelan dalam mengestimasi data panel, yaitu: 1) Model Efek Tetap : *Fixed Effect Model* (FEM), dan 2) Model Efek Random : *Random Effect Model* (REM).

3.5.1. Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Ada beberapa tipe permodelan dalam data panel, yaitu: 1) Model Efek Tetap / *Fixed Effect Model* (FEM), 2) Model Efek Random / *Random Effect Model* (REM), dan 3) Model Efek Umum / *Common Effect Model* (CEM).

1. Model Efek Tetap : *Fixed Effect Model* (FEM)

Teknik *fixed effect model* ialah teknik yang mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy dalam mengungkap adanya perbedaan intersep. Variabel dummy dapat digunakan sebagai variabel bebas. Model FEM digunakan

jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah runtun waktu (*time-series*) yang lebih besar dibanding jumlah data silang (*cross-section*).

2. Model Efek *Random* : *Random Effect Model* (REM)

Pada *Fixed Effect Model* perbedaan antar data silang dan runtun waktu dapat dicerminkan melalui *intercept*, sedangkan pada *Random Effect Model* perbedaan antar data silang dan runtun waktu dicerminkan dengan melalui *error*. Model REM digunakan jika data panel mempunyai jumlah waktu (*time series*) digunakan ternyata lebih kecil dibanding jumlah individu (*cross-section*).

3. Model Efek Umum : *Common Effect Model* (CEM)

Model ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi model data panel, yaitu dengan menggabungkan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu).

Untuk menentukan permodelan terbaik yang akan dipakai, diperlukan uji pemilihan teknik estimasi regresi. Terdapat beberapa metode yang sesuai dalam analisis data panel diantaranya yaitu:

1. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui model mana yang dapat dipilih antara model FEM atau CEM menggunakan Uji Restricted F-Test atau Chow-Test. Pengujian uji chow dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : pvalue > \alpha \text{ Model } Common \text{ Effect}$$

$$H_1 : pvalue < \alpha \text{ Model } Fixed \text{ Effect}$$

Cara mengukurnya yaitu ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≤ 0.05 maka sebaiknya memilih model *Fixed Effect*. Tetapi ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≥ 0.05 maka model yang dipilih yaitu *common effect*. Dari hasil uji chow didapatkan

pemodelan sementara, maka selanjutnya dilakukan pengujian Hausman untuk mengetahui manakah model yang terbaik yang harus dipakai.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk mengetahui model mana yang dapat dipilih antara model FEM atau REM guna diambil keputusan pemodelan terbaik yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian uji hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : pvalue > \alpha \text{ Model } Random \text{ Effect}$$

$$H_1 : pvalue < \alpha \text{ Model } Fixed \text{ Effect}$$

Cara mengukurnya yaitu ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≤ 0.05 maka sebaiknya memilih model *Fixed Effect*. Tetapi ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≥ 0.05 maka model yang dipilih yaitu *Random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk mengetahui model mana yang dapat dipilih antara model REM atau CEM yang paling tepat untuk digunakan. Uji LM digunakan jika pada uji chow menunjukkan model yang dipakai CEM, sedangkan pada uji hausman menunjukkan model yang dipakai REM, maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir penentuan model. Pengujian uji LM dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : pvalue < \alpha \text{ Model } Common \text{ Effect}$$

$$H_1 : pvalue > \alpha \text{ Model } Random \text{ Effect}$$

Cara mengukurnya yaitu ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≤ 0.05 maka sebaiknya memilih model *Common Effect*. Tetapi ketika nilai probabilitas *Chi-square* ≥ 0.05 maka model yang dipilih yaitu *Random effect*. Dari hasil uji chow

didapatkan pemodelan sementara, maka selanjutnya dilakukan pengujian Hausman untuk mengetahui manakah model yang terbaik yang harus dipakai.

3.5.2. Model Empiris

Di awal telah dijelaskan mengenai estimasi model persamaan data panel, yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} \quad (3.1)$$

Berdasarkan model di atas, maka model persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 PAD_{it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
DAU _{it}	: Dana Alokasi Umum di daerah i pada periode t
DAK _{it}	: Dana Alokasi Khusus di daerah i pada periode t
DBH _{it}	: Dana Bagi Hasil di daerah i pada periode t
PAD _{it}	: Pendapatan Asli Daerah di daerah i pada periode t
$\beta_{1,2,...,n}$: Koefisien Regresi
e_{it}	: <i>error term</i>

Setelah model penelitian di estimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran yang diperoleh dari masing – masing parameter untuk model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Dalam mengolah data statistic pada analisis regresi linier berganda, diperlukan beberapa pengujian untuk menjadi syarat penentu bahwa metode ini dapat dilakukan dalam penelitian. Uji yang dimaksud yaitu uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data terbebas dari masalah

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting untuk dilakukan guna menghasilkan estimator yang tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator* – BLUE). Uji asumsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa model regresi ini tidak mengandung masalah dan pengujian dapat dilanjutkan (Roma & Sinaga, 2019).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu uji pada asumsi klasik yang bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Dalam pengujian ini, secara khusus mengasumsikan bahwa kombinasi sejumlah besar variabel bebas akan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat ke dalam model regresi distribusi normal. Pada dasarnya data yang terdistribusi normal, jika fungsi linear tersebar dengan normal maka variabel yang disamakan dalam model regresi akan didistribusikan secara otomatis (Gujarati & Porter, 2012).

H_0 : JB > Chi-Square , Probability < α Data tidak terdistribusi normal

H_1 : JB < Chi-Square , Probability > α Data terdistribusi normal

Untuk menguji data tersebut apakah terdistribusi normal dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera ialah uji statistik dalam mengetahui apakah data berdistribusi normal. Untuk mengidentifikasi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat uji statistik Jarque-Bera Test (J-B Test) dan Probability. Kriteria pengujian dapat dilihat dengan dua cara, yaitu:

1. Ketika nilai JB < Chi-Square tabel maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi JB > Chi-Square maka data tidak terdistribusi normal.

2. Ketika Probability $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi Probability $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana adanya hubungan linier antar variabel bebas. Oleh karena melibatkan beberapa variabel bebas, maka dari itu multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno, 2017).

H_0 : koefisien korelasi $> 0,8$ Terjadi Multikolinieritas

H_1 : koefisien korelasi $< 0,8$ Tidak terjadi Multikolinieritas

Indikasi terjadinya multikolinieritas ditunjukkan dengan beberapa faktor (Winarno, 2017) berikut:

1. Nilai R^2 yang tinggi, namun variabel bebas banyak yang tidak signifikan.
2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila koefisien korelasi antarvariabel bebas nilainya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas.
3. Dengan melakukan regresi *auxiliary* yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua/lebih variabel yang secara bersamaan mempengaruhi satu variabel bebas lainnya.

Jika dilihat dari nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dan standar pengujian pada olah data untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas pada penelitian dapat dilihat dengan koefisien korelasi yang diperoleh $< 0,8$ maka tidak

terjadi multikolinearitas. Namun sebaliknya, apabila koefisien korelasi yang diperoleh $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2012).

Jika data masih terindikasi memiliki multikolinearitas, akan muncul akibat – akibat berikut ini:

1. Estimator masih bersifat BLUE, namun memiliki varian dan kovarian yang besar, maka dapat menyebabkan sulit dipakai sebagai alat estimasi.
2. Interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistik uji t akan kecil yang mana akan menyebabkan variabel independent tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependennya.

Namun ada cara alternatif agar menghilangkan multikolinearitas salah satunya yaitu dengan mentransformasikan salah satu atau beberapa variabel dengan melakukan diferensiasi (Winarno, 2017)

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan guna mengetahui apakah varians dari residual observasi satu dengan yang lainnya adalah sama. Sehingga, regresi dianggap baik jika lolos atau tanpa heteroskedastisitas. Salah satunya yaitu melalui uji white (*white test*). Dalam persamaan regresi diperlukan pengujian, Ketika homokedastisitas maka varian yang dimiliki mempunyai residual yang sama, sedangkan sebaliknya pada heterikedastisitas maka varian yang dimiliki berbeda-beda (Gujarati & Porter, 2012).

H_0 : Chi-Square hitung $>$ Chi-Square tabel Terjadi Heteroskedastisitas

H_1 : Chi-Square hitung $<$ Chi-Square tabel Tidak terjadi

Heteroskedastisitas

Dalam penggunaannya, uji white berguna mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada model penelitian (Gujarati & Porter, 2012). Standar pengujian untuk hasil pengolahan data yaitu ketika Chi-Square hitung < Chi-Square tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan sebaliknya ketika Chi-Square hitung > Chi-Square tabel maka terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu penelitian dengan residual penelitian lainnya (Winarno, 2017). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak penyimpangan asumsi klasik yang terjadi kesalahan residual pada antar penelitian. Yang mana pada asumsi klasik ini diketahui prasyarat yang harus dipenuhi yaitu dengan tidak adanya masalah pada autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi (Gujarati & Porter, 2012).

$H_0 : 1,54 > DW > 2,46$ Terjadi Autokorelasi

$H_1 : 1,54 < DW < 2,46$ Tidak terjadi autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilihat dari hasil nilai Durbin-Watson. Apabila D-W berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut tidak ada terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika DW tersebut tidak berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut ada terdapat autokorelasi (Winarno, 2017).

3.5.4. Hipotesis Statistik

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara. Dalam penelitian dapat dilihat melalui nilai probabilitas hasil regresi untuk menguji validitasnya sebelum menerima atau menolak hipotesis statistik. Dalam uji

hipotesis statistik ini dapat dengan mudah menyatakan apakah observasi atau penelitian memenuhi syarat hipotesis statistik yang dinyatakan, dengan membuat pernyataan pada H_0 atau *Null Hypothesis* merupakan pernyataan hipotesis statistik dan H_1 merupakan pernyataan pertahanan hipotesis statistik alternatif (Gujarati & Porter, 2012).

Pengujian hipotesis statistic dikenal dengan istilah pendekatan pengujian signifikansi. Yang mana uji signifikansi merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol. Dalam uji signifikansi, hasil regresi dikatakan signifikansi secara statistik jika nilai dari uji statistiknya berada pada daerah kritis. Dan sebaliknya, pengujian yang hasilnya dikatakan tidak signifikan, jika uji statistiknya berada di daerah penerimaan (Gujarati & Porter, 2012).

Sehingga dalam uji statistik pada penelitian ini menggunakan hipotesis yaitu:

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan dalam mengetahui pengaruh pada masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji-t dilakukan untuk membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 –

2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh dari Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_4 = 0$, artinya terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dianggap konstan

$H_1 : \beta_4 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun

2017 – 2022 dengan asumsi variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dianggap konstan

Kriteria pengambilan Keputusan pada hipotesis uji-t penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tolak H_0 artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial

2. Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan ialah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Simultan)

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022

$H_1 : \text{ada salah satu } \beta_i \neq 0$, artinya variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.

Dengan tingkat kepercayaan atau taraf signifikan 95% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis uji-F penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ tolak H_0 artinya variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Modal).
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak tolak H_0 artinya variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah) secara bersama- sama tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

3. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk mengukur sebaik apa sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya (Gujarati & Porter, 2012). Nilai koefisien determinasi (*Goodness of fit*) mencerminkan seberapa besar variasi dari regressand (Y) dapat diterangkan oleh regressor (X). Koefisien determinasi berada diantara 0 sampai dengan 1. Jika R^2 bernilai kecil maka variabel bebas memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Begitu pula jika mendapatkan nilai mendekati 1 maka variabel bebas akan menyampaikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memperkirakan perubahan pada variabel terikat.

H_0 : Model tidak BLUE ((*Best Linear Unbiased Estimator*))

H_1 : Model BLUE ((*Best Linear Unbiased Estimator*))

Jika koefisien determinasi lebih dari 60% atau 0,60 berarti penelitian memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) tetapi jika koefisien determinasi kurang dari 60% atau 0,60 sehingga tidak dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati & Porter, 2012).

BAB IV

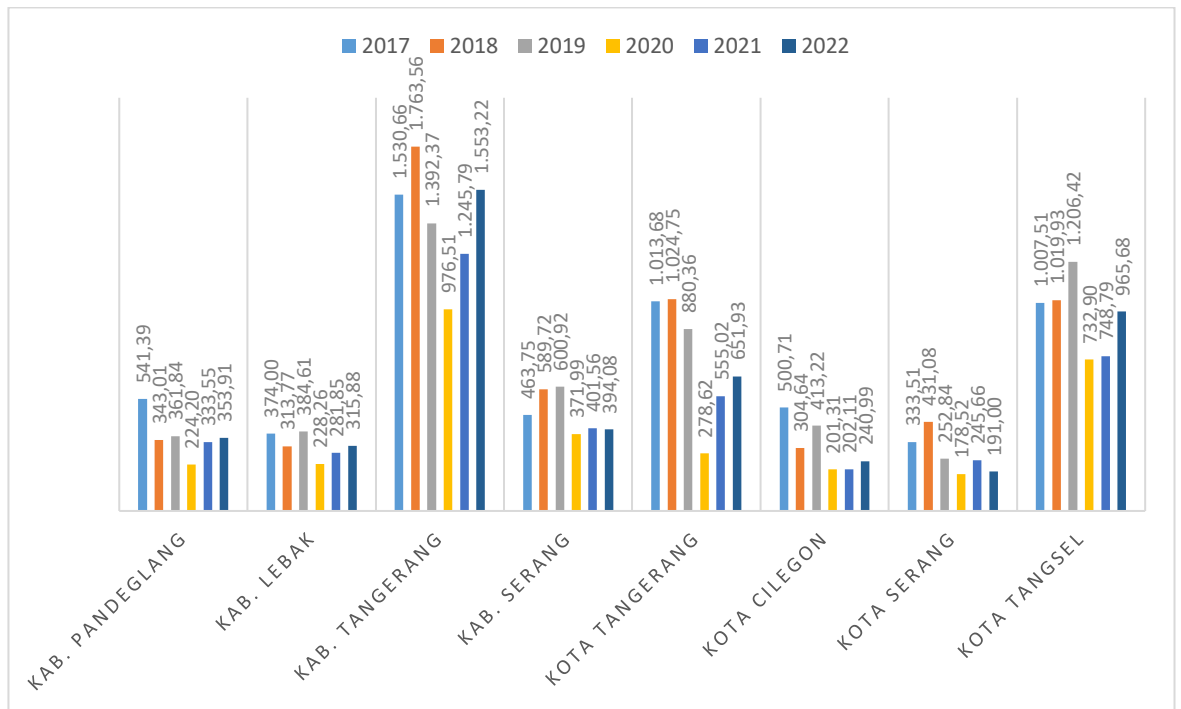
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Untuk mengetahui bagaimana gambaran variabel yang dipakai dalam suatu penelitian, maka perlu dilakukan gambaran umum. Variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independennya yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan cakupan wilayah yang terdapat di 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang serta 4 Kota diantaranya Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

4.1.1. Perkembangan Belanja Modal

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal. Berikut ini merupakan data perkembangan belanja modal di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

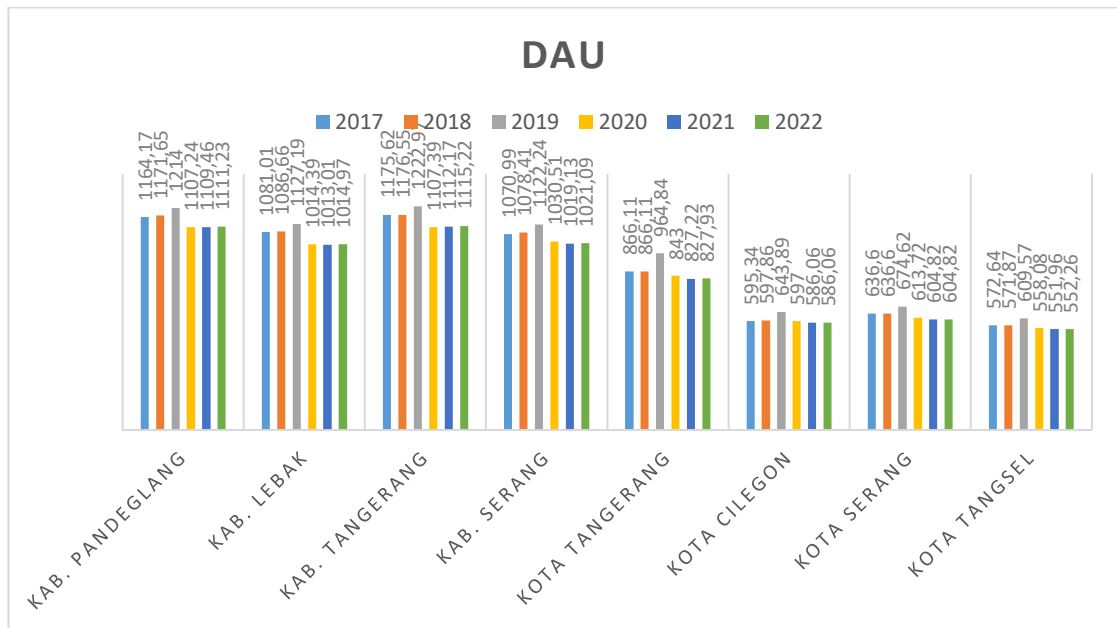
Gambar 4. 1 Perkembangan belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.1 menunjukkan perkembangan belanja modal pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dimana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa angka belanja modal secara keseluruhan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 – 2022 Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang pengeluaran belanja modal paling tinggi se Provinsi Banten. Belanja modal di Kabupaten Tangerang semakin meningkat seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, dan berbagai program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibanding daerah yang lain di

Provinsi Banten. Hal tersebut sesuai dengan nilai pengeluaran belanja modalnya cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain, dimana nilai belanja modal Kabupaten Tangerang tertinggi terjadi pada tahun sebesar 1763,56 Milyar Rupiah. Sedangkan Kota Serang menjadi daerah yang belanja modal terendah di Provinsi Banten pada tahun 2020, yaitu sebesar 178,52 Milyar Rupiah. Hal ini dikarenakan penyebab dari fenomena covid-19 yang menyebabkan kurangnya optimalisasi belanja modal seperti pembangunan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan publik yang mengakibatkan kurangnya investor di Kota Serang.

4.1.2. Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menjadi salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Alokasi Umum di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

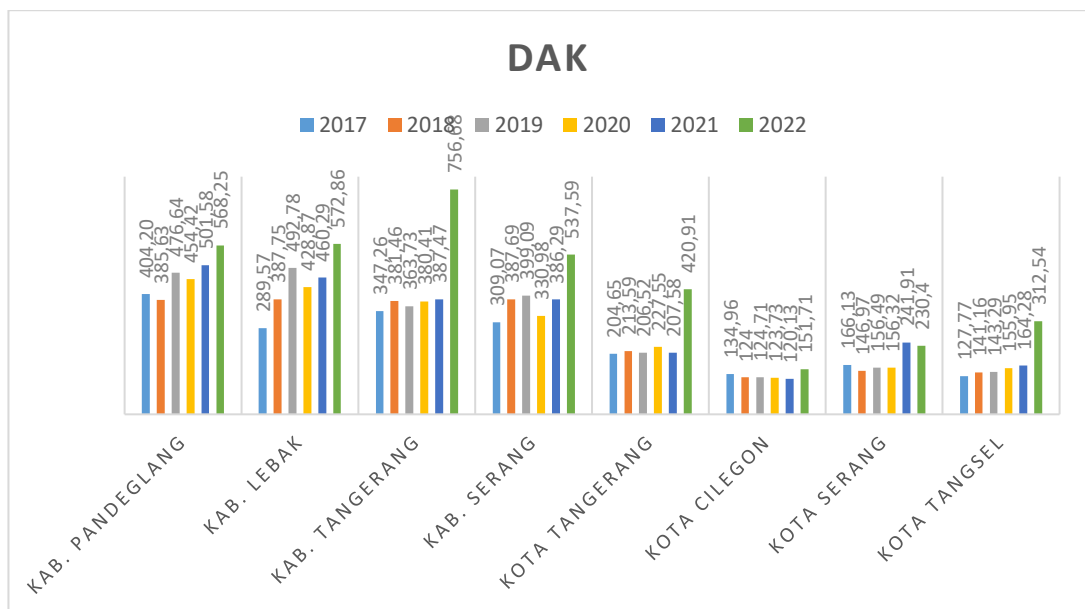
Pada gambar 4.2 menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa anggaran DAU lebih banyak realisasinya pada daerah Kabupaten dibanding daerah Kota. Karena menurut definisi, DAU digunakan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dimana wilayah kabupaten lebih banyak mendapatkan realisasi DAU demi mengatasi kesenjangan fiskalnya.

Menurut Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten (2021), kontribusi terbesar dari pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu berasal dari DAU. Besarnya DAU yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK.

4.1.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Berikutnya yang menjadi variabel independent penelitian ini ialah Dana Alokasi Khusus. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Alokasi Khusus di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

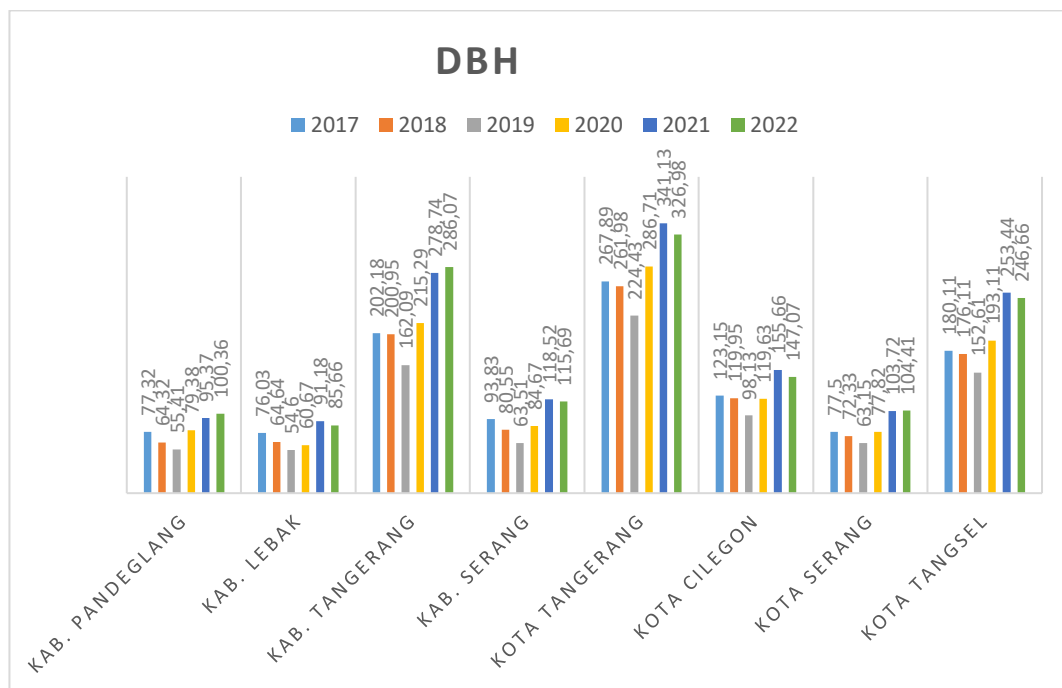
Gambar 4. 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.3 menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Khusus pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa terjadi tren fluktuatif pada wilayah kabupaten dan cenderung

stabil pada wilayah kota. Selama periode 2017 sampai dengan 2022, rata-rata DAK tertinggi terdapat pada Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut membuahkan hasil pada tahun 2022 dimana PemKab Pandeglang meraih penghargaan realisasi Dana Alokasi Khusus fisik tercepat tahun 2022.

4.1.4. Perkembangan Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil juga merupakan salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Bagi Hasil di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



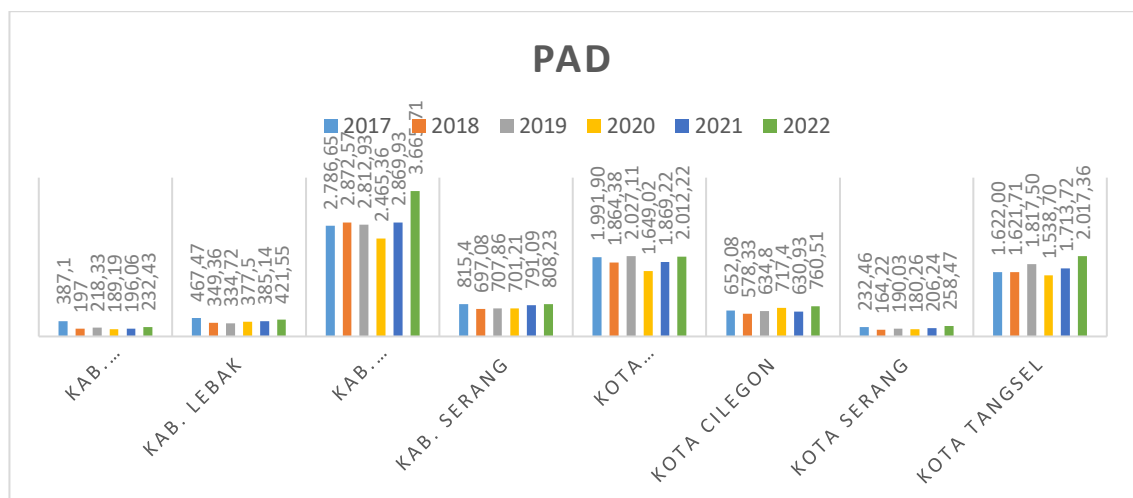
Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 4 Perkembangan Dana Bagi Hasil pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.4 menunjukkan perkembangan Dana Bagi Hasil pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan terjadi tren yang fluktuatif dan polanya hampir sama pada setiap kabupaten/kota. Namun Dana Bagi Hasil yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 terutama di Kota Tangerang sebesar 341 milyar.

4.1.5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya pemerintah daerah untuk pembiayaan pelayanan publiknya. Maka dari itu PAD menjadi salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.5 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa PAD tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang. Dapat dilihat ketimpangannya sangat signifikan jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jumlah industri yang dibangun dan memproduksi secara aktif di Kabupaten Tangerang.

Menurut Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten (2021) jika dilihat dari pendapatan daerah, realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi salah satunya pada tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan realisasi pendapatan daerah terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 14,19%.

4.2 Hasil Analisis dan Estimasi Model Regresi Data Panel

4.2.1. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode Panel data yaitu gabungan dari runtun waktu (Time Series) dan runtun wilayah (Cross Section). Pada penelitian ini dimana data runtun waktu atau Time Series yang digunakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan data runtun wilayah atau Cross Section yaitu pada 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang serta 4 (empat) kota yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ialah bagaimana

pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan model berikut :

$$BM_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

Keterangan :

BM	: Belanja Modal (Ribu Rupiah)
DAU	: Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (Ribu Rupiah)
DBH	: Dana Bagi Hasil (Ribu Rupiah)
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)
β_0	: Intersep ; Nilai Y Ketika X = 0 (harga konstan)
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: Koefisien regresi masing-masing variabel independent
ε	: eror
t	: waktu

4.2.2. Hasil Pengujian Pemilihan Model

Arah dari pengujian ini yaitu untuk menentukan model terbaik dalam estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Permodelan dengan Teknik analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan alternatif dalam pengolahannya yang terdiri dari model OLS Pooled atau *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

4.2.2.1 Hasil Uji Chow

Uji yang digunakan kali ini untuk tahu model manakah yang dipilih antara model CEM atau FEM menggunakan Uji *Restricted F-test* atau *Chow-Test*. Dengan menggunakan hipotesis yaitu:

$$H_0 : \rho_{\text{value}} > \alpha \text{ Model Common Effect}$$

$$H_1 : \rho_{\text{value}} < \alpha \text{ Model Fixed Effect}$$

Ukuran yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada Uji Chow yaitu Ketika nilai probabilitas *Chi-Square* $\leq 0,05$ maka sebaiknya memilih model Fixed Effect. Tetapi Ketika nilai probabilitas *Chi-Square* $\geq 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Common Effect*.

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2,790816	(7,36)	0,0199
<i>Cross-section Chi-square</i>	20,808351	7	0,0041

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Jika dilihat dari hasil uji diatas menunjukkan dimana nilai Prob. *Cross-section Chi Square* $< \alpha$ atau $0,0041 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan tolak H_0 yang artinya model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Selanjutnya dilakukan pengujian Hausman guna mengetahui manakah model yang terbaik yang harus dipakai diantara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Dengan hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{\text{value}} > \alpha$ Model *Random Effect*

$H_1 : \rho_{\text{value}} < \alpha$ Model *Fixed Effect*

Dalam Uji Hausman, jika hasil dari uji mendapatkan nilai *Prob. Cross-Section Random* < 0,05 maka model yang dipakai yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), dan apabila nilai *Prob. Cross-Section Random* > 0,05 maka model yang dipakai yaitu *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	5,686178	4	0,2238

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan dimana nilai *Prob. Cross-Section Random* > α atau $0,2238 > \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan tolak H_1 yang artinya model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Sehingga dari hasil pengujian dalam pemilihan model terbaik yaitu Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, dapat disimpulkan model estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

4.2.3. Hasil Estimasi Model

Estimasi hubungan antar variabel yang mempengaruhi Belanja Modal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* pada program Eviews, didapatkan hasil model persamaan regresi data panel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Panel Data

Variabel	Koefisien
C	4,09E+08
DAU	-0,008317
DAK	-0,164531
DBH	-2,922406
PAD	0,613875

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Berdasarkan hasil estimasi diatas, diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$BM_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.2)$$

$$BM_t = 409.000.000 - 0,008317 DAU_t - 0,164531 DAK_t - 2,922406 DBH_t + 0,613875 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.3)$$

Interpretasi dari hasil estimasi diatas yaitu:

1. Konstanta

Berdasarkan hasil estimasi diketahui koefisien konstanta yaitu 409.000.000, artinya ketika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan maka Belanja Modal adalah sebesar 409.000.000.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar -0,008317, artinya peningkatan DAU sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.8,31 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar -0,164531, artinya peningkatan DAK sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.164,53 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Bagi Hasil sebesar -2,922406, artinya peningkatan DBH sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.2.922,4 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

5. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,613875, artinya peningkatan PAD sebesar Rp.1.000,- akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp.613,87 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4.2.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian statistik yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Hal ini dilakukan agar dapat melihat apakah data tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik ini penting dilakukan dalam menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan

varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator* – BLUE), yang artinya model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu perlu adanya bukti lebih lanjut apakah model regresi yang digunakan dapat memenuhi asumsi tersebut.

4.2.5.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi pada analisis statistik adalah data terdistribusi normal. Uji Normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui nilai sebaran pada data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data tersebut apakah terdistribusi normal dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera ialah uji statistic dalam mengetahui apakah data berdistribusi normal. Untuk mengidentifikasi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat uji statistic Jarque-Bera Test (J-B Test) dan Probability. Dengan pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

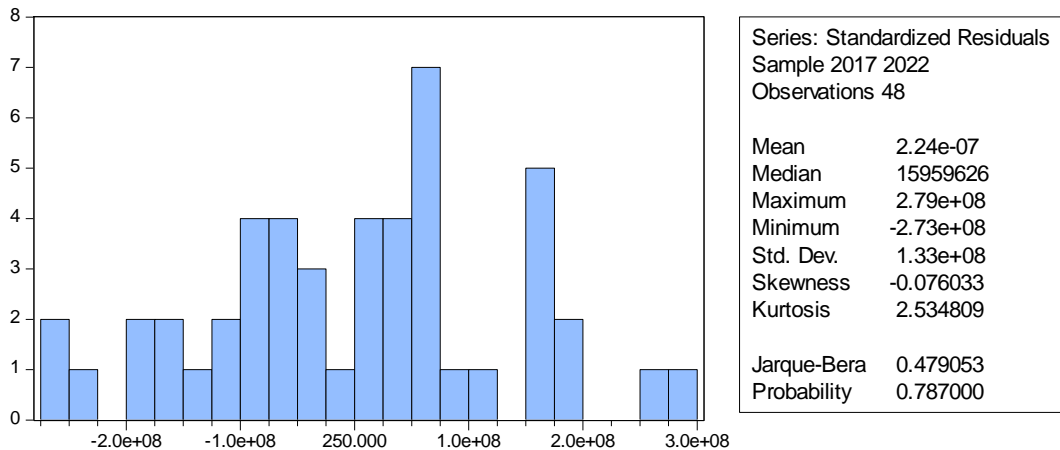
H_0 : Data tidak terdistribusi normal

H_1 : Data terdistribusi normal

Pengujian dapat dilihat dengan dua cara, yaitu:

1. Ketika nilai $JB < \text{Chi-Square tabel}$ maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi $JB > \text{Chi-Square}$ maka data tidak terdistribusi normal.
2. Ketika $\text{Probability} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi $\text{Probability} < \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data tidak terdistribusi normal.

Berikut ini hasil pengolahan uji normalitas dari seluruh variabel yang diteliti :



Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 4.7 hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa besaran nilai Jarque-bera yaitu 0.479053 yang mana jika nilai $JB < \chi^2$ tabel dan nilai prob. JB (P-Value) $> \alpha$ maka data terdistribusi normal. Nilai JB (0.479053) $< (59.303512)$ Chi Square tabel dan prob. (0.787000) $> (0,05)$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut Tolak H_0 yang mana artinya data terdistribusi normal.

4.2.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi dimana adanya hubungan linier antar variabel independent. Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinearitas maka digunakan nilai *correlation matrix* dari semua variabel independent. Nilai *correlation matrix* harus kurang dari 0,8 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *correlation matrix* ada yang bernilai negatif, hal tersebut

tidak berpengaruh karena yang diperhatikan tetap angkanya. Pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

H_0 : Terjadi Multikolinearitas

H_1 : Tidak terjadi Multikolinearitas

Berikut ini uji multikolinearitas menggunakan correlation matrix:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	DAU	DAK	DBH	PAD
DAU	1.000000	0.794486	-0.151872	0.122613
DAK	0.794486	1.000000	-0.095728	0.081838
DBH	-0.151872	-0.095728	1.000000	0.823774
PAD	0.122613	0.081838	0.823774	1.000000

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 , dinyatakan bahwa tidak tolak H_0 dimana nilai matriks korelasi menunjukkan masih terdapat nilai korelasi $> 0,8$. Maka dalam hasil ini masih terdapat masalah asumsi klasik multikolinearitas. Oleh sebab itu, sebagai solusinya adalah menggunakan metode diferensiasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Diferensiasi

	D(DAU)	D(DAK)	D(DBH)	D(PAD)
D(DAU)	1.000000	0.222976	-0.630005	0.348226
D(DAK)	0.222976	1.000000	-0.165219	0.510921
D(DBH)	-0.630005	-0.165219	1.000000	-0.089825
D(PAD)	0.348226	0.510921	-0.089825	1.000000

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Setelah melakukan diferensiasi didapatkan hasil yang menunjukkan nilai korelasi $< 0,8$ maka hasil tersebut menyatakan Tolak H_0 yang artinya data lolos dari uji asumsi klasik multikolinearitas.

4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan guna mengetahui apakah varians dari residual observasi satu dengan yang lainnya adalah sama. Sehingga, regresi dianggap baik jika lolos atau tanpa heteroskedastisitas. Salah satunya yaitu melalui uji white (*white test*). Dalam persamaan regresi diperlukan pengujian, Ketika homokedastisitas maka varian yang dimiliki mempunyai residual yang sama, sedangkan sebaliknya pada heterikedastisitas maka varian yang dimiliki berbeda-beda (Gujarati & Porter, 2012).

H_0 : Terjadi Heteroskedastisitas

H_1 : Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Standar pengujian untuk hasil pengolahan data yaitu:

- 1) Apabila tidak terjadi heteroskedastisitas ketika *Chi-square* hitung < *Chi-square* tabel (H_0 ditolak).
- 2) Apabila terjadi heteroskedastisitas ketika *Chi-square* hitung > *Chi-square* tabel (H_0 tidak ditolak).

Cara menghitung chi square hitung yaitu: $R^2 \times n$. Adapun R^2 diperoleh dari hasil Pool data dan “n” merupakan jumlah data per variabel.

Chi square tabel didapatkan dari rumus yang dihitung pada ms. Excel: =CHIINV(0.05, n-k). k merupakan jumlah variabel dalam penelitian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Jumlah Data (n)	R-squared	Jumlah Variabel	Chisquare_{statistik} = (n x R-Squared)	Chi-Square_{table}	Hasil
48	0,834453	5	40,053744	59,303512	Tolak H_0

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dapat diketahui dari Chi Square hitung yaitu 40,053744 dan Chi Square tabel yaitu 59,303512. Dilihat dari hasil tersebut menyatakan bahwa Tolak H_0 yang dapat di katakan bahwa chi square hitung < chi square tabel maka data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.5.4 Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan metode Durbin Watson autokorelasi terdeteksi. Dari hasil pengujian Autokorelasi dengan nilai *Durbin Watson* akan berada pada kisaran 0 hingga 4 dimana $du < d < 4 - du$ maka dalam penelitian ini tidak terkena autokorelasi. Menurut Winarno (2017) apabila D-W berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut tidak ada terdapat autokolerasi. Sebaliknya, jika DW tersebut tidak berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut ada terdapat autokolerasi. Pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

H_0 : Terjadi Autokorelasi

H_1 : Tidak terjadi Autokorelasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Dw	Estimasi Pengujian
1,680721	$1,54 < 1,680721 < 2,46$

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dari hasil regresi diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,680721 dan jika mengacu pada buku yang ditulis oleh Winarno (2017) nilai tersebut berada diantara 1,54 dan 2,46. Hasil pengolahan data diatas maka data tersebut Tolak H_0 yang artinya terbebas dari autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis Statistik

4.3.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T

Variabel	t-statistik	t-tabel	Prob	Keputusan
C	2,876510	2,016692	0,0062	
Dana Alokasi Umum (DAU)	-0,049759	2,016692	0,9605	Tidak Tolak H_0 , Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,802663	2,016692	0,4266	Tidak Tolak H_0 , Tidak Signifikan
Dana Bagi Hasil (DBH)	-5,156131	2,016692	0,0000	Tolak H_0 , Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,07340	2,016692	0,0000	Tolak H_0 , Signifikan

Sumber : Pengolahan Data Eviews

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh antara DAU dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_1 \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh antara DAU dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-0,049759 < 2,016692$ T Tabel, Tidak tolak H_0 yang artinya tidak terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,9605 > 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU dengan Belanja Modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh DAK dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh DAK dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-0,802663 < 2,016692$ T Tabel, Tidak tolak H_0 yang artinya tidak terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,4266 > 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAK dengan Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh DBH dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh DBH dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-5,156131 > 2,016692$ T Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,0000 < 0,05$ (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel DBH dengan Belanja Modal.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_3 = 0$ tidak terdapat pengaruh PAD dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ terdapat pengaruh PAD dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $12,07340 > 2,016692$ T Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,0000 < 0,05$ (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD dengan Belanja Modal.

4.3.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

$H_0 : \beta_0 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

$H_1 : \beta_0 \neq 0$ terdapat pengaruh variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F

F-Statistik	F-Tabel	Prob.	α	Keputusan
54,18606	5,710907	0,000000	0,05	Tolak H_0 , Signifikan

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Interpretasi :

F hitung 54,18606 > 5,710907 F Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” 0,0000 < 0,05 (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

4.3.3 Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk mengukur sebaik apa sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya (Gujarati & Porter, 2012). Nilai koefisien determinasi (*Goodness of fit*) mencerminkan seberapa besar variasi dari regressand (Y) dapat diterangkan oleh regressor (X). Koefisien determinasi berada diantara 0 sampai dengan 1. Jika R^2 bernilai kecil maka variabel bebas memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Begitu pula jika mendapatkan nilai mendekati 1 maka variabel bebas akan menyampaikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memperkirakan perubahan pada variabel terikat.

H_0 : Model tidak BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

H_1 : Model BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Jika koefisien determinasi lebih dari 60% atau 0,60 berarti penelitian memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) tetapi jika koefisien determinasi kurang dari 60% atau 0,60 sehingga tidak dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati & Porter, 2012).

Dari hasil uji Koefisien determinasi terdapat nilai R-squared sebesar 0,834453 yang mana menunjukkan hasil Tolak H_0 maka penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 83% Belanja Modal di pengaruhi oleh tingkat DAU, DAK, DBH dan PAD lalu sisanya sebesar 17% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian tersebut.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak ada pengaruh serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,9605 > 0,05$ (Alpa) dan nilai t-statistik sebesar $-0,049759 < 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar $-0,008317$, artinya peningkatan DAU sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.8,31. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan

atau penurunan Dana Alokasi Umum tidak begitu mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Rochmatullah et al. (2016), Purba et al. (2021), Pangaribuan et al. (2018), dan Sinaga (2021) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et al. (2021), Mundiroh (2019), Rahma & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal daerah.

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Pemerintah pusat atau daerah dapat memberlakukan ketentuan tertentu terkait penggunaan DAU. Jika ada pembatasan atau aturan yang mengarahkan DAU untuk digunakan pada kegiatan operasional atau pengeluaran

rutin, daripada belanja modal, maka DAU mungkin tidak secara langsung memengaruhi belanja modal. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas pengeluaran mereka. Jika pemerintah daerah memilih untuk mengalokasikan DAU untuk kegiatan atau program non-modal, maka DAU tidak akan berdampak langsung pada belanja modal. DAU cenderung digunakan untuk belanja rutin kegiatan pemerintah daerah dibanding untuk pembangunan infrastruktur (Rochmatullah et al., 2016). Karena belanja modal biasanya memerlukan perencanaan jangka panjang dan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah mungkin cenderung mengalihkan dana ke belanja operasional yang lebih mendesak. Teori efek flypaper menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung menghabiskan dana yang diterima dari pemerintah pusat (seperti DAU) untuk belanja yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, seperti belanja operasional, daripada belanja modal yang manfaatnya mungkin baru terasa dalam jangka panjang.

Berdasarkan pada teori keagenan, informasi tentang DAU dan DAK disampaikan sebelum pembahasan anggaran daerah yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislative (DPRD). Maka dana tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan dengan pertimbangan tertentu. DAU adalah salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil bagi pemerintah daerah. Namun, ketidakpastian dalam penerimaan pendapatan lainnya, seperti pendapatan asli daerah (PAD) atau transfer dari pemerintah pusat lainnya, dapat membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam merencanakan belanja modal yang memerlukan komitmen dana yang besar di masa depan. Namun, sebagian dana

perimbangan yang lain dapat kemungkinan mengalami perubahan angka karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan riil yang terjadi (Pangaribuan, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,4266 > 0,05$ (α) dan nilai t-statistik sebesar $-0,802663 < 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar $-0,164531$, artinya peningkatan DAK sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.164,53. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan atau penurunan Dana Alokasi Khusus tidak begitu mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Purba et al. (2021), Pangaribuan et

al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et al. (2021), Sinaga (2021), Rahma & Riharjo (2019), Sudika & Budiarta (2017).

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan Pemda karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis (Pangaribuan, 2018).

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana pemerintah selaku pemegang kekuasaan. DAK sering kali diarahkan untuk proyek-proyek spesifik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah mungkin menjadi terlalu bergantung pada DAK untuk proyek-proyek tersebut dan mengurangi inisiatif untuk menggunakan sumber daya sendiri atau dana lainnya untuk belanja modal. Ketika pemerintah daerah menerima DAK untuk proyek-proyek tertentu, mereka mungkin mengalihkan dana mereka sendiri yang seharusnya digunakan untuk belanja modal ke belanja operasional atau kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Ini bisa menyebabkan penurunan dalam total belanja modal meskipun ada tambahan dana dari DAK. Jika pemerintah daerah atau instansi penerima DAK mengalami ketidakmampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek-proyek belanja modal, maka DAK mungkin tidak akan

berdampak signifikan. Kurangnya kapasitas manajerial dapat menghambat efektivitas penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan pada teori keagenan, informasi tentang DAU dan DAK disampaikan sebelum pembahasan anggaran daerah yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislative (DPRD). Maka dana tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Namun, sebagian dana perimbangan yang lain dapat kemungkinan mengalami perubahan angka karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan riil yang terjadi (Pangaribuan, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil terdapat pengaruh dan signifikan serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) dan nilai t-statistik sebesar $-5,156131 > 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Bagi Hasil sebesar $-2,922406$, artinya peningkatan DBH sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.2.922,4. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi

peningkatan atau penurunan Dana Bagi Hasil mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Ishak et al. (2021), Rahma & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun tidak sejalan dengan studi empiris dari Mundiroh (2019).

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam daerah. Dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan dengan mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal (Ishak et al., 2021).

Jika pemerintah memiliki fleksibilitas dalam alokasi anggaran, penurunan dana bagi hasil bisa mendorong mereka untuk memotong pengeluaran di area lain guna menyediakan dana untuk proyek-proyek belanja modal. Ini mungkin terjadi jika belanja modal dianggap sebagai prioritas strategis. Pemerintah juga tidak dapat bergantung pada dana bagi hasil sebagai sumber utama pendanaan, penurunan dana bagi hasil dapat mendorong pemda untuk mencari sumber dana alternatif. Ketika DBH meningkat, dana tambahan ini dapat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka pendek seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, atau program-program sosial, alih-alih investasi jangka panjang. Dalam usaha untuk memperoleh

dana baru, pemda akan lebih mungkin untuk meningkatkan belanja modal dengan cara mengakses sumber dana yang lebih fleksibel atau lebih besar salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah yang mana hal tersebut dapat membawa pada Kemandirian Fiskal suatu daerah tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh dan signifikan serta mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (alpha) dan nilai t-statistik sebesar $12,07340 > 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,613875, artinya peningkatan PAD sebesar Rp.1.000,- akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp.613,87. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et

al. (2021), Jumiati et al. (2019), Mundiroh (2019), Mulyani (2016), Rochmatullah & Hartanto (2016), Elni (2016), Fisher & Wassmer (2015).

Ini menunjukkan PAD memiliki tolak ukur memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah, indikator PAD yang mampu memengaruhi Belanja Modal juga dapat dinyatakan sebagai bentuk kemandirian daerah atas pemenuhan kebutuhan pembelanjaan tanpa bantuan penuh dari pemerintah pusat (Herawati & Lestari, 2022). PAD merupakan parameter produktivitas pemda yang inovasinya mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan asset produktif. Untuk meningkatkannya inovasi pengembangan asset produktif tersebut berdampak dalam peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja modal. (Rochmatullah et al., 2016). Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat suatu daerah dan menarik minat investor untuk investasi yang mana akan meningkatkan pendapatan daerah. (Mulyani, 2016)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dianggap konstan.

4.4.5. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pada variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah

terdapat pengaruh dan signifikan secara simultan terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) dan nilai f-statistik sebesar $54,18606 > 5,710907$ (F_{tabel}). Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi perubahan pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022 sebesar 83,44% yang artinya penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten. Penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten periode tahun 2017 sampai dengan 2022, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Dalam uji hipotesis secara parsial, hasil analisis menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal, dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2. Dalam uji hipotesis secara simultan, diketahui hasil analisis menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang di dapat, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, diantaranya :

1. Jika dilihat dari penelitian ini terdapat fenomena berbeda dari kebanyakan penelitian serupa yaitu tidak adanya pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Modal, yang artinya diharapkan pemerintah daerah dapat meninjau kembali proporsi pengalokasian DAU dan DAK untuk lebih dioptimalkan anggarannya pada Belanja Modal.
2. Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah untuk kemandirian fiskal daerah setempat agar dalam pengadaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi dengan menambah variabel lain atau variabel control guna mencegah adanya hasil perhitungan yang bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani. (2014). *Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i1.1121.g953>
- Atas, P., Menteri, P., Negeri, D., & Tahun, N. (2007). *Menteri dalam negeri republik indonesia*. 1–13.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2018 - 2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Dace Purba, Damanik, D., & Purba, E. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 115–126. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.262>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)*. 2009, 85–94.
- Gujarati, & Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herawati, I. D., & Lestari, N. (2022). Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan ...*, 2(1), 24–30. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/view/72%0A>
- Ishak, J. F., Sari, Y. P., Dwitayanti, Y., & Mauluddi, H. A. (2021). The Determinants Factors of Capital Expenditure. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(2), 158–165. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i2.224>
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwanis, D. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, Special Autonomic Funds, and Economic Growth on Capital Expenditures Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14317>
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Mulyani, H. (2016). *The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government*. 163–166.

<https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.29>

- Pangaribuan, L. dkk. (2018). *Determinan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan*. 143–149.
- Patasik, C. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan)*. 12, 1–61.
- Rahma, D. N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh pad, dau, dak terhadap ipm dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada kabupaten/kota di provinsi papua tahun 2009 -2013). *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.24912/je.v22i2.224>
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(2), 152. <https://doi.org/10.23917/jep.v17i2.2082>
- Roma, S., & Sinaga, U. L. I. (2019). *Pengaruh faktor-faktor anggaran pemerintah terhadap pengalokasian belanja modal provinsi sumatera utara tahun 2016-2019*.
- Sudika, I. K., & Budiarta, K. I. (2017). "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA BELANJA MODAL PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), B. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1–30.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Regresi

Wilayah	Tahun	BM	DAU	DAK	DBH	PAD
KABPDG	2017	541.393.604	1.164.174.459	404.195.942	74.952.105	387.100.585
KABPDG	2018	343.009.277	1.171.648.878	385.626.887	64.414.061	196.996.807
KABPDG	2019	361.843.940	1.213.995.208	476.644.007	49.610.691	218.326.858
KABPDG	2020	224.200.219	1.107.241.659	454.416.135	79.219.493	189.186.453
KABPDG	2021	333.545.823	1.109.460.000	501.580.000	95.370.000	196.060.818
KABPDG	2022	353.914.954	1.111.230.000	568.250.000	100.360.000	232.434.104
KABLBK	2017	374.004.043	1.081.007.407	289.569.030	71.913.967	467.474.538
KABLBK	2018	313.774.638	1.086.661.291	387.752.106	64.635.654	349.363.427
KABLBK	2019	384.607.182	1.127.187.626	492.778.445	53.766.199	334.722.737
KABLBK	2020	228.259.512	1.014.388.131	428.872.944	56.961.955	377.504.404
KABLBK	2021	281.854.753	1.013.010.000	460.290.000	91.180.000	385.144.019
KABLBK	2022	315.867.289	1.014.970.000	572.860.000	85.660.000	421.548.555
KABTGR	2017	1.530.660.350	1.175.621.706	347.258.818	190.038.192	2.786.647.280
KABTGR	2018	1.763.560.497	1.176.554.274	381.460.785	200.954.615	2.872.568.513
KABTGR	2019	1.392.365.179	1.222.971.999	363.728.692	162.087.265	2.812.933.125
KABTGR	2020	976.512.264	1.107.392.704	380.412.924	213.951.129	2.465.364.758
KABTGR	2021	1.245.790.580	1.112.170.000	387.470.000	278.740.000	2.869.928.724
KABTGR	2022	1.553.223.517	1.115.220.000	758.680.000	286.070.000	3.665.710.324
KABSRG	2017	463.747.394	1.070.989.882	309.068.179	90.069.202	815.399.914
KABSRG	2018	589.719.505	1.078.411.345	387.690.020	80.550.617	697.085.200
KABSRG	2019	600.917.055	1.122.244.253	399.088.131	63.199.929	707.865.882
KABSRG	2020	371.988.143	1.030.506.343	330.979.484	84.526.569	701.215.211
KABSRG	2021	401.561.919	1.019.130.000	386.290.000	118.520.000	791.086.614
KABSRG	2022	394.080.632	1.021.090.000	537.590.000	115.690.000	808.234.794
KTTGR	2017	1.013.676.204	866.113.340	204.652.774	251.627.361	1.991.898.969
KTTGR	2018	1.024.749.199	866.113.340	213.587.477	261.975.708	1.864.385.585
KTTGR	2019	880.363.220	964.844.367	206.522.599	223.869.980	2.027.112.806
KTTGR	2020	278.622.423	843.004.535	227.546.008	283.661.219	1.649.021.201
KTTGR	2021	555.016.076	827.220.000	207.580.000	341.130.000	1.869.216.636
KTTGR	2022	651.926.317	827.930.000	420.910.000	326.980.000	2.012.220.935
KTCLG	2017	500.709.558	595.338.097	134.958.287	116.724.836	652.084.326
KTCLG	2018	304.636.620	597.861.842	123.996.175	119.946.085	578.335.346
KTCLG	2019	413.224.916	643.891.037	124.713.796	98.126.631	634.798.056
KTCLG	2020	201.312.400	597.547.066	123.735.681	119.602.372	717.400.616
KTCLG	2021	202.115.102	586.060.000	120.130.000	155.660.000	630.935.132
KTCLG	2022	240.989.478	586.060.000	151.710.000	147.070.000	760.514.605
KTSRG	2017	333.514.135	636.602.678	166.134.840	74.592.964	232.458.208

Wilayah	Tahun	BM	DAU	DAK	DBH	PAD
KTSRG	2018	431.082.095	636.602.678	146.974.402	72.332.263	164.218.549
KTSRG	2019	252.842.394	674.620.421	156.487.473	63.147.050	190.029.710
KTSRG	2020	178.523.626	613.720.963	156.321.861	77.794.442	180.263.229
KTSRG	2021	245.657.966	604.820.000	241.910.000	103.720.000	206.238.435
KTSRG	2022	190.996.539	604.820.000	230.400.000	104.410.000	258.466.611
KTTANGSEL	2017	1.007.512.393	572.637.313	127.768.036	166.623.274	1.622.004.639
KTTANGSEL	2018	1.019.928.804	571.874.988	141.157.635	176.107.104	1.621.710.653
KTTANGSEL	2019	1.206.419.179	609.575.078	143.290.791	152.596.723	1.817.505.710
KTTANGSEL	2020	825.683.819	558.077.884	155.949.928	193.115.125	1.538.705.693
KTTANGSEL	2021	748.795.987	551.960.000	164.280.000	253.440.000	1.713.722.416
KTTANGSEL	2022	965.682.851	552.260.000	312.540.000	246.660.000	2.017.364.068

Lampiran 2. Hasil Regresi

a. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.790816	(7,36)	0.0199
Cross-section Chi-square	20.808351	7	0.0041

b. Hasil Uji Hausman

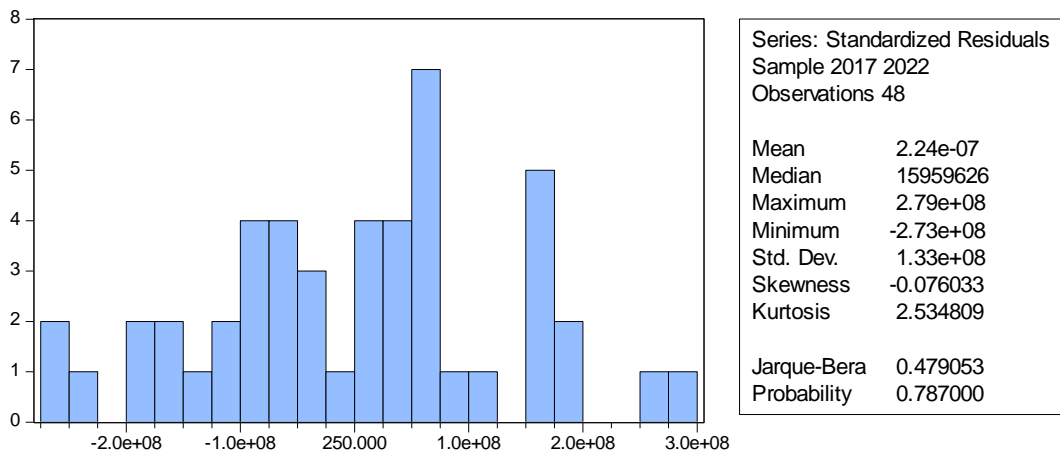
Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.686178	4	0.2238

c. Hasil Uji Normalitas



d. Hasil Uji Multikolinearitas

	DAU	DAK	DBH	PAD
DAU	1.000000	0.794486	-0.151872	0.122613
DAK	0.794486	1.000000	-0.095728	0.081838
DBH	-0.151872	-0.095728	1.000000	0.823774
PAD	0.122613	0.081838	0.823774	1.000000

e. Hasil Uji Diferensiasi

	D(DAU)	D(DAK)	D(DBH)	D(PAD)
D(DAU)	1.000000	0.222976	-0.630005	0.348226
D(DAK)	0.222976	1.000000	-0.165219	0.510921
D(DBH)	-0.630005	-0.165219	1.000000	-0.089825
D(PAD)	0.348226	0.510921	-0.089825	1.000000

f. Hasil Uji Pooled Data

Dependent Variable: BM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/26/24 Time: 21:56
 Sample: 1 6
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 8
 Total pool (balanced) observations: 48
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.09E+08	1.42E+08	2.876510	0.0062
DAU?	-0.008317	0.167156	-0.049759	0.9605
DAK?	-0.164531	0.204981	-0.802663	0.4266
DBH?	-2.922406	0.566783	-5.156131	0.0000
PAD?	0.613875	0.050845	12.07340	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KALBK--C	-25991431			
_KABPDG--C	69592724			
_KABSRG--C	-34740789			

_KABTGR--C	-33232563
_KTCLG--C	-65018677
_KTSRG--C	8387209.
_KTTANGSEL--C	64415748
_KTTGR--C	16587778

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		59847627	0.1948
Idiosyncratic random		1.22E+08	0.8052
Weighted Statistics			
R-squared	0.834453	Mean dependent var	3.86E+08
Adjusted R-squared	0.819053	S.D. dependent var	2.92E+08
S.E. of regression	1.24E+08	Sum squared resid	6.62E+17
F-statistic	54.18606	Durbin-Watson stat	1.680721
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.897486	Mean dependent var	6.04E+08
Sum squared resid	8.29E+17	Durbin-Watson stat	1.340772

Lampiran 3. Tabel Durbin Watson

a = 5% (0,05)

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716

BIODATA MAHASISWA



Nama : Bahjatun Nadzilah Yahsa
Nim : 5553190072
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 23 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Email : nadzila.y2014@gmail.com
No. Handphone : 0895332027085
Alamat : Jl. Raya Cilegon Km.3 Kp.Legok Sukmajaya
Rt.03/01 no.21 kel. Drangong, Kec. Taktakan Kota
Serang Banten
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Ilmu Ekonomi Pembangunan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 6 Kota Serang
2. SMP Negeri 15 Kota Serang
3. SMA Negeri 3 Kota Serang
4. S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta (2020-2021)